



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA PLTU DI KECAMATAN TALAWI KOTA SAWAHLUNTO

SKRIPSI

*Dajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
Riau*



UIN SUSKA RIAU

OLEH

YULIA AZIZAH SYARIF
NIM : 11724203055

UIN SUSKA RIAU

JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

1442 H/2021 M

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul ***"Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Upaya Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Pencemaran Udara PLTU Di Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto"*** yang ditulis oleh :

Nama : Yulia Azizah Syarif
 NIM : 11724203055
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah
 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 8 Juli 2021
 26 Dzulqaidah 1442

Pembimbing Skripsi,

Dr. Sofia Hardani, M.Ag
 NIP. 19630530 199303 2 001



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Upaya Pemerintah Daerah dalam Pengendalian Pencemaran Udara PLTU di Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto”**, yang ditulis oleh :

Nama : Yulia Azizah Syarif
 NIM : 11724203055
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Jumat, 06 Agustus 2021
 Waktu : 14.00 WIB
 Tempat : Ruang Auditorium Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 06 Agustus 2021M
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Mawardi, M.Ag

Sekretaris
Irfan Zulfikar, M.Ag

Penguji I
Dr. Hj. Hertina, M.Pd

Penguji II
Haswir, M.Ag

(Signatures of the Exam Panel Members)

Mengetahui :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP. 197410062005011005

SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Yulia Azizah Syarif (2021) : Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Upaya Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Pencemaram Udara PLTU Di Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto

Penelitian ini dilatar belakangi proses pembangunan yang dilakukan yang dilakukan PLTU timbul permasalahan pencemaran udara yang sangat vital masalah lingkungan hidup yang menjadi suatu permasalahan ataupun kerap terjadi dalam lingkungan masyarakat. Khususnya di Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto. Dari data Puskesmas Talawi pada tahun 2018 ada 2.577 orang yang menderita ISPA di Kecamatan Talawi dan tahun 2019 meningkat menjadi 3.570 orang. Berdasarkan UU PPLH diamanatkan dalam Pasal 71 ayat (1) bahwa “Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengangkat beberapa pokok permasalahan yakni bagaimana upaya pemerintah daerah Kota Sawahlunto dalam pengendalian pencemaran udara, apa faktor penghambat pemerintah daerah Kota Sawahlunto dalam pengendalian pencemaran udara dan bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap upaya pemerintah daerah Kota Sawahlunto dalam pengendalian pencemaran udara.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data primer yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup, pihak PLTU, Kepala Desa Sijantang dan Masyarakat Desa Sijantang. Sedangkan data sekundernya dari data-data yang penulis dapatkan dari referensi buku-buku pustaka, dan bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik analisis yang penulis gunakan adalah deskriptif kualitatif. Kemudian teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling.

Dari penelitian ini dapat di ketahui bahwasanya upaya pemerintah daerah terhadap pengendalian pencemaran udara yaitu pemantauan kualitas udara ambient serta pengawasan langsung dan tidak langsung. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut ada beberapa faktor penghambatnya yaitu faktor yuridis, faktor keuangan, faktor sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia. Faktor pendukungnya pengawasan bersama dinas lingkungan hidup pusat dan provinsi, pihak PLTU terbuka kepada pihak dinas LH tidak ada yang ditutupi. Dalam pandangan fiqh siyasah pengendalian pencemaran udara yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Sawahlunto tidak sesuai dengan syariat islam, karena yang dilakukannya adalah merusak jiwa dan kemaslahatan umat.

Kata Kunci : Tinjauan, Pencemaram Udara, PLTU, Fiqih Siyasah



KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, dengan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, sehingga dapat dipersembahkan kepada pembaca yang budiman dan pembaca yang cinta akan ilmu pengetahuan.

Atas berkat rahmat Allah SWT, penulis berhasil menyelesaikan skripsi berjudul **“TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA PLTU DI KECAMATAN TALAWI KOTA SAWAHLUNTO”**.

Karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki, maka dengan tangan terbuka dan hati yang lapang penulis menerima kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan dimasa yang akan datang. Dalam penulisan skripsi ini juga tidak luput dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ayahanda Simainski, ibunda tercinta Desmiwati yang telah memberikan bantuan materil, moril maupun spiritual kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKARIAU.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag, selaku Rektor UIN SUSKA RIAU, Bapak Dr. H. Suryan A. Jamrah, M.A Selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pembangunan UIN Suska Riau, Bapak H. Kusnadi, M.Pd Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan UIN Suska



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Riau, dan Bapak Drs. H. Promadi, MA.,Ph.D selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama UIN Suska Riau. Yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di Universitas tercinta ini,
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum bapak Dr.Zulkifli, M.Ag, Wakil Dekan I bapak Dr.H.Erman,M.Ag, Wakil Dekan II bapak Dr.H.Mawardi, M.Si, dan Ibu Wakil Dekan III Dr.Sofia Hardani, M.Ag.
3. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) bapak Rahman Alwi, M.Ag serta Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) bapak Irfan Zulfikar M.Ag yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA RIAU.
4. Ibu Dr.Sofia Hardani,M.Ag selaku pembimbing yang telah memberikan petunjuk, arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Penasehat Akademis (PA) penulis yang selalu memberikan saran-saran dan motivasi kepada penulis selama kuliah di UIN SUSKA RIAU bapak Rahman Alwi, M.Ag.
6. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya dan seluruh dosen Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada umumnya,yang telah memberikan ilmu serta pengetahuan kepada penulis selama menimba ilmu di UIN SUSKA RIAU.
7. Keluarga besar Hukum Tata Negara (Siyasah), terkhusus keluarga HTNS angkatan 17 yang telah banyak membantu dan memberikan saran kepada



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

penulis selama belajar mengajar di bangku perkuliahan. Semoga kekeluargaan kita tetap bersatu selamanya.

9. Untuk Sahabat Rizky Sufani, Novi Silvia, Sucia Ayu, Dila Artika Sari dan Atika Mutiah yang sangat berjasa yang telah banyak membantu penulis baik dalam memotivasi dan memberi semangat.
10. Untuk semua keluarga, sahabat, teman, inspirator dan orang-orang spesial dalam hidup penulis yang memberikan motivasi dan nasehat, yang namanya tak dapat disebutkan satu-persatu, penulis ucapkan terimakasih atas semuanya. Hanya Allah SWT yang bisa membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.

Akhirnya kepada Allah SWT penulis berserah diri dan kepada manusia penulis mohon maaf dan semoga apa-apa yang kita kerjakan mendapat keridhoan dari Allah SWT. Amin ya robbal 'alamin.

Pekanbaru, 9 Juli 2021
Penulis,

YULIA AZIZAH SYARIF
NIM.11724203055

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB IPENDAHULUAN	
A. Latar belakang	1
B. Batasan masalah	12
C. Rumusan masalah	12
D. Tujuan penelitian	13
E. Manfaat penelitian	13
F. Metode penelitian	14
G. Sistemika penulisan	20
BAB IITINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Kecamatan Talawi	21
1. Geografi	21
2. Iklim	21
3. Penduduk dan Mata Pencapaian	22
4. Visi dan Misi Kecamatan Talawi	24
B. Gambaran Umum Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	24
1. Sejarah Berdirinya	24
2. Visi Misi	27
3. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	27
4. Standard Operating Procedure (SOP) Pengawasan Lingkungan Hidup	36
5. Struktur Organisasi Perangkat Daerah	37
BAB IIITINJAUAN TEORITIS	
A. Pencemaran Udara	38
1. Pengertian Pencemaran Udara	38
2. Jenis Pencemaran Udara	42

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

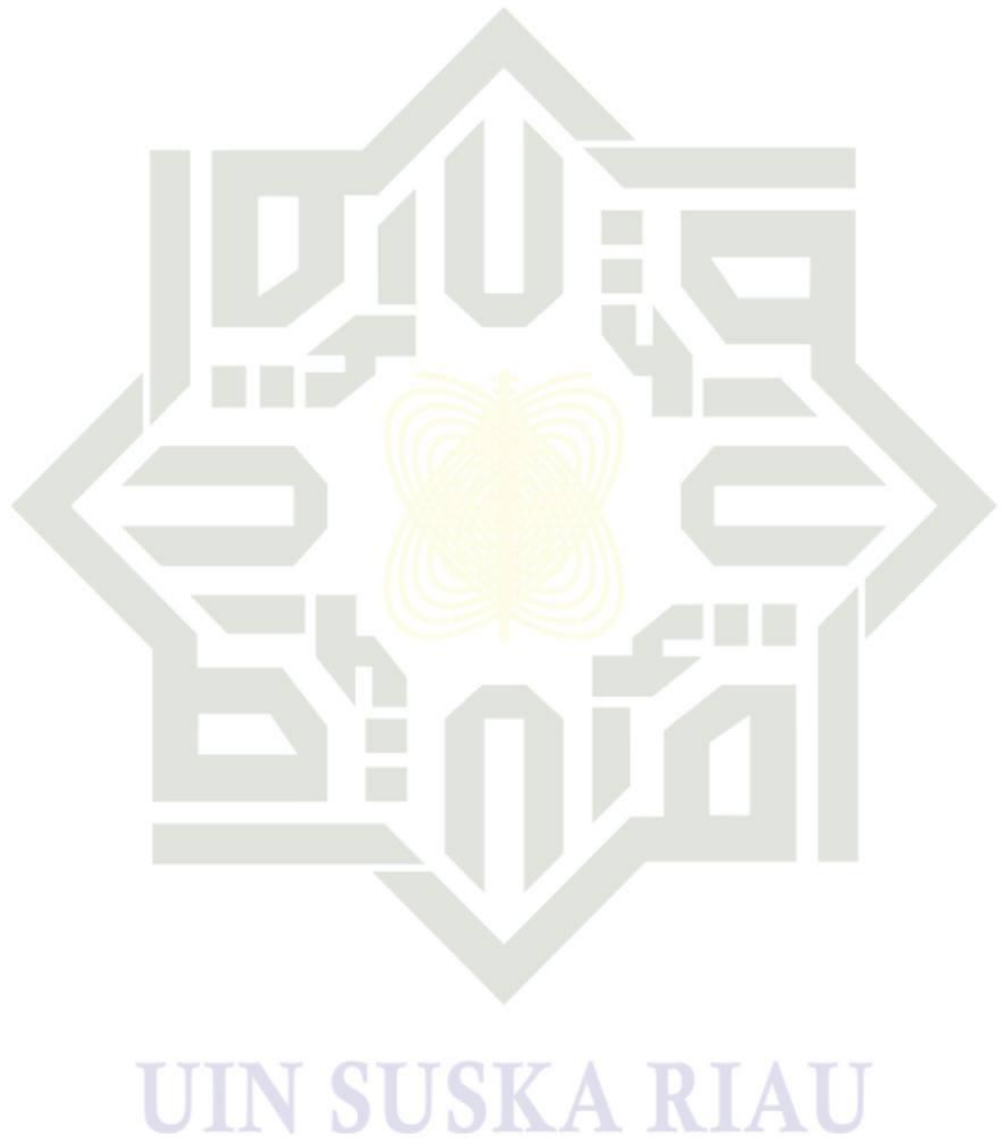
3. Proses Terjadinya Pencemaran Udara	44
4. Pengendalian Pencemaran Udara	46
5. Indeks Pencemar	48
B. Pengertian Upaya.....	50
C. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	50
D. Fiqh Siyasah dan Ruang Lingkupnya	57
1. Pengertian Fiqh Siyasah	57
2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah	59
3. Sumber Kajian Fiqh Siyasah	61
4. Fiqh Siyasah Dusturiyah.....	62
E. Syariat Islam terhadap Pencemaran dan Perusakan Lingkungan.....	67
BAB IVHASIL PENELITIAN	
A. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto dalam Pengendalian Pencemaran Udara di Kecamatan Talawi	68
B. Faktor Penghambat Upaya Pemerintah Kota Sawahlunto dalam Pengendalian Pencemaran Udara.....	81
C. Pandangan Fiqh Siyasah terhadap Upaya PemerintahDaerah Kota Sawahlunto dalam Pengendalian Pencemaran Udara....	88
BAB VPENUTUP	
A. Kesimpulan.....	96
B. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
BIOGRAFI PENULIS	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Jumlah Penduduk Kecamatan Talawi	22
Tabel II.2 Mata Pencaharian Kecamatan Talawi	23





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak pulau yang mengelilinginya dan juga memiliki suku bangsa yang berbeda dari segi etnis, ras, dan budaya yang beranekaragam. Sejalan dengan hal tersebut Indonesia mempunyai jumlah penduduk yang begitu banyak nomor tiga di dunia setelah Cina dan India, tercatat menurut Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk Indonesia yaitu 167 juta jiwa, dan mengalami kenaikan. Dengan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat maka proses pembangunan baik segi ekonomi, politik dan budaya akan semakin meningkat.¹

Pembangunan sendiri merupakan suatu hal yang wajib dilaksanakan bagi pemerintah baik dari pusat maupun daerah guna menjadi tolak ukur kemajuan suatu negara. Dalam proses pembangunan sendiri harus berkesinambungan dengan lingkungan hidup. Hal ini di atur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Hidup. Untuk itu lingkungan hidup perlu menjadi perhatian utama guna mendorong proses pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam percepatan proses pembangunan yang dilakukan timbul permasalahan yang sangat vital yaitu masalah lingkungan hidup yang menjadi suatu permasalahan ataupun kerap terjadi dalam lingkungan masyarakat.

¹Ahmad Redi, 2018, *Hukum Sumber Daya Alam Indonesia*, Setara Press, Malang, hlm 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Masalah ini menjadi perhatian secara menyeluruh baik di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang tak kunjung terselesaikan. Secara garis besar lingkungan hidup mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Pembangunan dan perindustrian selain memberikan dampak bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, juga telah menimbulkan permasalahan lingkungan. Kegiatan manusia mengakibatkan pencemaran lingkungan seperti pencemaran tanah, air, udara, kerusakan hutan dan lahan, kerusakan ekosistem laut dan masalah berbahaya dan beracun (B3).

Untuk itu agar tidak terjadinya dampak yang akan merusak lingkungan hidup dan mengabaikan hak masyarakat maka perlu dipedomani Pasal 28 H Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Dengan demikian pengakuan hak atas lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara di Indonesia dan hak konstitusional bagi setiap warga negara. Adanya jaminan semacam ini memberi kemungkinan bagi setiap orang untuk menuntut kepada pemerintah agar kebaikan dan kesehatan lingkungannya perlu diperhatikan dan ditingkatkan.

Selain itu suatu kewajiban bagi negara untuk selalu menciptakan lingkungan hidup yang baik bagi warganya dan penyehatan lingkungan hidup. Namun sebagian besar masyarakat dapat merasakan bahwa selama ini hak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ata lingkungan hidup yang baik dan sehat hanyalah sebuah pesan kosong, padahal lingkungan hidup itu sendiri memiliki manfaat yang beragam bagi masyarakat.

N.H.T Siahaan berpendapat bahwa “Salah satu faktor yang dapat memenuhi kebutuhan manusia tersebut adalah lingkungan hidup. Lingkungan hidup memiliki peranan yang sangat kuat dalam kehidupan manusia.² Sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tertulis bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ini mengartikan bahwa lingkungan sebagai sumber daya manusia merupakan aset yang sangat diperlukan dalam menyejahterakan masyarakat.

Fungsi lingkungan hidup itu sendiri menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah sebagai daya dukung untuk mendukung prikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.³ Dalam perspektif teoritis, fungsi lingkungan hidup diharapkan dapat memberi kontribusi positif untuk menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya dalam menjalankan aktivitas masing-masing.⁴

Dalam Undang Undang ini Pasal 1 Ayat (2) juga menyatakan bahwa “Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistem dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan

² N.H.T.Siahaan,2004,*Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*,(Jakarta:Erlangga),hlm.2

³ Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁴ Nursyafni Atikah,Skripsi:”*Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar Dalam Pengendalian Pencemaran Sungai Akibat Limbah Industri Di Kecamatan Tapung*” (Pekanbaru:UIN SUSKA RIAU,2019),hlm.15

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.⁵

Salah satu tujuan utama pengelolaan lingkungan hidup adalah terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Setiap kegiatan pembangunan, dimanapun dan kapanpun, pasti akan menimbulkan dampak. Dampak ini dapat bernilai positif yang berarti dapat memberi manfaat bagi kehidupan manusia, dan dampak negatif yaitu timbulnya risiko yang dapat merugikan masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya dampak negatif lebih banyak terjadi. Sehingga banyak terjadi masalah-masalah lingkungan hidup yang berdampak terhadap masyarakat ataupun lingkungan hidup itu sendiri. Kegiatan pembangunan sumber energi yang semakin meningkat mempunyai kecenderungan secara potensial dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan apabila tidak terkendali secara profesional, sehingga secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa kegiatan industri merupakan alat untuk menyejahterakan masyarakat, akan tetapi disatu sisi dapat menyebabkan malapetaka bagi kehidupan manusia itu sendiri, yaitu pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.⁶

Berdasarkan Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU PPLH) tertulis bahwa Pencemaran lingkungan itu sendiri adalah “masuknya

⁵ Op.cit,Pasal 1 Ayat 2

⁶ Djatmiko,Margono,Wahyono,Pendayaan Waste Management (Kajian Lingkungan Indonesia),PT Citra Aditya Bakti, Bandung,2000

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

atau dimasukannya zat energi, dan atau komponen yang lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.”⁷

Pada Pasal 20 Angka 2 UU PPLH tertulis bahwa “Baku mutu lingkungan hidup meliputi”⁸:

- a. Baku mutu air;
- b. Baku mutu air limbah;
- c. Baku mutu air laut;
- d. Baku mutu udara ambien;
- e. Baku mutu emisi;
- f. Baku mutu gangguan; dan
- g. Baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pembangunan yang sedang giat dilakukan oleh pemerintah Indonesia saat ini adalah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). PLTU ini dibangun dengan tujuan untuk meningkatkan pasokan listrik yang bermanfaat bagi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Indonesia.

Banyaknya pembangunan PLTU di Indonesia tentu menuai berbagai macam pendapat dan tanggapan, baik dari kalangan masyarakat maupun pemerintahan, memang pembangunan PLTU ini merupakan salah satu langkah untuk meningkatkan sarana dan prasana yang nantinya akan bermanfaat bagi

⁷ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 Angka 14

⁸ UU PPLH Pasal 20 Angka 2

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

masyarakat Indonesia. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan PLTU ini juga menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan maupun masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Dampak negatif yang paling menonjol adalah adanya pencemaran udara serta dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat sekitar daerah terdampak.

Pembangkit Listrik Tenaga Uap dalam beroperasi menghasilkan sebuah limbah, limbah ini dinamakan *Fly ash dan bottom ash* (FABA) atau disebut limbah batubara. Limbah batubara (*fly ash dan bottom ash*) merupakan abu yang terbang ringan dan abu yang relatif berat yang timbul dari proses pembakaran yang lazimnya menghasilkan abu. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) bahwa "*fly ash dan battom ash* (FABA) termasuk dalam jenis B3 yang pemanfaatannya harus mendapatkan izin dari kementerian lingkungan hidup."⁹

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara dengan maksud agar industri yang ada atau pelaku usaha mampu menjaga dan memperhatikan lingkungan hidup. Kemudian dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara bahwa yang dimaksud pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun

⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya.¹⁰

Di Desa Sijantang, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto terdapat Pembangkit Listrik Tenaga Uap yang bernama PLTU Ombilin. PLTU ini sudah beroperasi sejak tahun 1996, kurang lebih sudah 25 tahun sejak Pembangkit Listrik Tenaga Uap ini beroperasi.¹¹ Sudah seperempat abad beroperasi tentu PLTU ini dalam pengoperasiannya tidak selalu berjalan lancar, ada masalah-masalah yang menimbulkan dampak negatif baik bagi lingkungan ataupun masyarakat sekitar. Salah satu masalah yang penulis temui di lapangan melalui pernyataan warga sekitar saat beroperasinya PLTU Ombilin di Kota Sawahlunto adalah pencemaran udara yang berakibat tidak sehatnya kadar udara dan kondisi lingkungan sekitar.

Berdasarkan hasil pemantauan kualitas udara ambient di desa Sijantang Koto, Kecamatan Talawi pada 2019 menunjukkan partikel micron (PM) 2,5. Indeks kualitas udara di lingkungan pemukiman warga yang berdekatan dengan PLTU Ombilin ini berada dalam posisi bahaya, yaitu mencapai 408 dengan PM 2,5 sebesar 376 mikrogram per meter kubik sedangkan sesuai peraturan Menteri Lingkungan Hidup tentang baku mutu pembangkit listrik tenaga termal, ambang batas PM 2,5 adalah 100 mikrogram per meter kubik.¹²

¹⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara

¹¹ <http://klikpositif.com/baca/20159/ini-rangkuman-sejarah-pltu-ombilin-sawahlunto> diakses pada 25 April 2021, pk1 15.00 WIB

¹² Wawancara dengan Heantomas, tanggal 22 Oktober 2020 di Kantor LH Sawahlunto.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diketahui berdasarkan wawancara dengan Bapak Ahmadi selaku Manager bagian Keuangan dan Umum bahwa, ” *salah satu filter udara cerobong asap PLTU Ombilin rusak dikarenakan spesifikasi batubara yang diolah menjadi bahan bakar tidak sesuai dengan ketentuan atau kriteria yang ada, sehingga mesin atau filter ini menjadi sering rusak* ”.¹³ Berdasarkan wawancara dengan ibuk Ida bahwa, ” *pada pertengahan 2019 masyarakat sijantang mengeluhkan kondisi ini dan membuat surat pengaduan yang ditujukana kepada Direktur Utama PT PLN di Jakarta* ”.¹⁴ Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang juga meminta pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Uap Ombilin ini dihentikan sementara dikarenakan asap beracun dari limbah PLTU ini mengancam kesehatan masyarakat.¹⁵ Dari data Puskesmas Talawi pada tahun 2018 ada 2.577 orang yang menderita ISPA di Kecamatan Talawi dan tahun 2019 meningkat menjadi 3.570 orang.¹⁶

Berdasarkan UU PPLH diamanatkan dalam Pasal 71 ayat (1) bahwa “Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

¹³ Wawancara dengan Bapak Ahmadi, Kantor PLTU Sijantang, 11 Januari 2021

¹⁴ Wawancara dengan ibuk Ida, di Desa Sijantang ,tanggal 16 Agustus 2021

¹⁵ <https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/ptlx3f348/lbh-padang-minta-pltu-ombilin-berhenti-operasi> diakses pada 21 Maret 2020

¹⁶ Sumber dari Puskesmas Talawi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam hal ini pemerintah Kota Sawahlunto memiliki Peraturan Daerah yang berkaitan dengan pencemaran udara tersebut yaitu Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup yang dalam Bab V (Larangan) Pasal 10 huruf i dikatakan bahwa “Dilarang membuang limbah cair, padat dan gas serta kebisingan yang melebihi baku mutu lingkungan hidup dan kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup yang berlaku” bunyi pasal tersebut mengisyaratkan pelaku industri atau pengguna lingkungan hidup untuk tetap berpedoman pada larangan-larangan tersebut agar terciptanya lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Namun dalam pelaksanaannya peraturan ini tidak terlaksana dengan baik, padahal sudah tertera dengan jelas hal-hal yang dilarang oleh Pemerintah Kota Sawahlunto.

Kemudian dalam Peraturan Daerah tersebut dalam Bab VI Peran Serta Masyarakat dikatakan bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal yang dapat dilakukan masyarakat diantaranya adalah melakukan pengawasan sosial, pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan dan/atau penyampaian informasi dan/atau laporan. Laporan tersebut dapat disampaikan oleh masyarakat kepada Kepala Desa lingkungan terdampak yang kemudian disampaikan secara tertulis kepada Walikota. Selanjutnya laporan ini akan ditindak lanjuti oleh Walikota melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Bidang Lingkungan Hidup Daerah untuk melakukan pengawasan terhadap pencemaran udara yang ditimbulkan oleh PLTU dan tindak lanjut dari hasil pengawasan tersebut. Dalam hal ini masyarakat juga sudah berupaya mencoba

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan aksi demonstrasi terhadap pihak PLTU Ombilin dikarenakan limbah abu yang berterbangan disekitar wilayah terdampak.

Dalam sistem ketatanegaraan islam masalah pengawasan harus mendapat perhatian dari pemerintah, demi menciptakan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu pemerintah harus membentuk suatu lembaga yang mempunyai tugas khusus untuk melaksanakan *al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar*, sebagai upaya preventif agar tidak terjadi pelanggaran yang akan mengakibatkan kerusakan dan kemudharatan. Institusi ini dikenal dengan wilayah al-hisbah.¹⁷

Dasar pendirian lembaga ini adalah firman Allah SWT Surat Ali Imran ayat 104 yang berbunyi:

Allah berfirman dalam surat Ali-Imran ayat 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ١٠٤

Artinya:

“Dan hendaklah diantar kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makhruf, dan mencegah dari yang munkar. Dan mereka itulah orang yang beruntung”

Wilayah al-hisbah ini mempunyai tugas yang sangat luas, yaitu terkait dengan pelaksanaan *al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar*. Tugas ini merupakan tugas fardhu yang harus dilaksanakan penguasa. Oleh karenanya, penguasa harus mengangkat orang-orang yang dipandang cakap untuk tugas ini.

Meskipun al-Quran menggambarkan agar setiap muslim memainkan suatu peran aktif dalam *al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar*, hal ini telah

¹⁷ Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Negara Islam*, terjemahan Fadli Bahri, (Jakarta: Darul Falah, 2000), hlm.208

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dijadikan fardhu kifayah, suatu kewajiban yang harus tetap ditunaikan oleh sebagian orang di masyarakat. Negara Islam telah diperintahkan agar membagikan ketetapan-ketetapan untuk mengawasi penerapan kewajiban *al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar*.¹⁸

Tugas dan kewenangan muhtasib dapat diklasifikasikan dalam tiga kategori:

1. Yang terkait dengan Allah, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa masyarakat secara keseluruhan memiliki fasilitas yang memadai untuk menjalankan ibadah.
2. Yang terkait dengan hak sesama (muamalah), memantau penegakan keadilan di masyarakat. Seperti pengawasan timbangan, takaran, kadar metal suatu koin, dan kualitas produk-produk makanan.
3. Yang terkait dengan hak Allah dan manusia, memberikan perhatian yang khusus terhadap berbagai layanan umum khususnya kondisi kesehatan kota. Ia harus memantau seluruh pengelolaan seperti penerangan jalan, pengelolaan sampah, desain arsitektur bangunan-bangunan kota, suplai air dan sanksi-sanksi anti polusi dan sebagainya.

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa tugas dan wewenang lembaga hisbah sebagai lembaga negara Islam sangatlah luas, dan hampir mencakup keseluruhan bidang kehidupan, dan bahkan lebih luas dari wilayah al-qadha' dan ma'adhalim.

Dengan melihat fakta-fakta yang terjadi masalah kerusakan lingkungan hidup diatas, maka sangat penting penulis untuk membahas masalah kewenangan badan

¹⁸ Ibnu Taimiyah, *Tugas Negara Menurut Islam*, penerjemah Arif-Maftuhin Dzofir, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2004)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

lingkungan hidup (BLH) sebagai salah satu lembaga pemerintah yang bertanggung jawab tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup seperti yang dijelaskan dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 PPLH dalam perspektif fiqh siyasah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk menelitinya dalam bentuk skripsi dengan judul : **Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Upaya Pemerintah Daerah dalam Pengendalian Pencemaran Udara PLTU di Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto.**

B. Batasan Masalah

Untuk membatasi agar penelitian ini tidak meluas dan terarah penulis membatasi penelitian ini hanya pada upaya pemerintah daerah terhadap pengendalian pencemaran udara akibat penggunaan batubara sebagai sumber energy Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Desa Sijantang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana Upaya Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto dalam pengendalian pencemaran udara PLTU berdasarkan Perda No. 2 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup di Desa Sijantang?

2. Apa faktor penghambat dan pendukung Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto dalam pengendalian pencemaran udara PLTU berdasarkan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perda No. 2 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup di Desa Sijantang?

Bagaimana Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap upaya Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto dalam pengendalian pencemaran udara PLTU berdasarkan Perda No. 2 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup di Desa Sijantang?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan dan Kegunaan Penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui upaya Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto dalam mengendalikan pencemaran udara.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung upaya Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto dalam pengendalian pencemaran udara.
3. Untuk mengetahui pandangan Fiqh Siyasah terhadap upaya pengendalian pencemaran udara yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis, diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bagi fakultas, diharapkan dapat menjadi khazanah keilmuan bagi Fakultas Syariah dan Hukum terutama jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) dan mahasiswa pada umumnya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bagi instansi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara PLTU di Kota Sawahlunto.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan sifat penelitian
 - a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan kejadian dan fenomena yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan yang ada.¹⁹

Dalam penelitian ini akan digambarkan bagaimana peran pemerintah daerah berdasarkan Perda No.2 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup di Kota Sawahlunto (dalam kajian Fiqh Siyasah). Untuk itu pendekatan deskriptif kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian lapangan adalah suatu inkuisi empiris yang menyelidiki fenomena dalam konteks kehidupan nyata, bilamana batas-batas antara fenomena dan konteks tak nampak tegas dan dimana multi sumber bukti

¹⁹ Moh Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Jakarta: Erlangga, 2009), ed Ke-2, hlm: 23-24

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimanfaatkan.²⁰ Lokasi dalam penelitian ini adalah di PLTU Sijantang, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat. Penulis tertarik melakukan penelitian di PLTU Sijantang ini karena sebagaimana diketahui, abu dari hasil pembakaran PLTU Sijantang telah membuat dampak buruk bagi kesehatan masyarakat yang berada di sekitar lokasi. Mengingat ini akan berdampak buruk bagi warga sekitar, tentunya ada upaya pemerintah daerah berdasarkan perda No.2 Tahun 2013 tentang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah individu, benda, atau organisasi yang dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian. Istilah lain adalah responden, yaitu orang yang memberirespons atau suatu perlakuan yang diberikan kepadanya.²¹ Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala bagian Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto, Kepala seksi Pengawasan dan Pemulihan Lingkungan Hidup, Kasi Tata Lingkungan, UPTD Laboratorium Lingkungan, Manager Bagian Keuangan dan Umum PLTU Sijantang, Bagian Pelaksana Lingkungan, Kepala Desa Sijantang, masyarakat Sijantang. Objek Penelitian ini adalah upaya pemerintah daerah dalam pengendalian pencemaran udara berdasarkan Perda No.2 Tahun 2013 tentang

²⁰ Burhan Bungin, *Analisis data penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), cet. Ke-1, hlm:20

²¹ *Op.cit*, Moh. Idrus. hlm:91

pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup berdasarkan tinjauan fiqh siyasah.

4. Sumber Data

Berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan masalah yang digunakan, pada prinsipnya penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu lapangan dan kepustakaan. Sedangkan jenis datanya yaitu:²²

a. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari lapangan di dapat setelah melakukan wawancara dengan Kepala bagian Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto, Kepala seksi Pengawasan dan Pemulihan Lingkungan Hidup, Kasi Tata Lingkungan, UPTD Laboratorium Lingkungan, Asistant Manager bagian Pengelola Lingkungan PLTU Sijantang, Bagian Lingkungan, Kepala Desa Sijantang, dan masyarakat Sijantang .

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (dihasilkan pihak lain) atau digunakan oleh lembaga lain yang bukan merupakan pengolahnya, tapi dapat di manfaatkan data suatu penelitian

²² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), cet. ke-1, h. 156.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifudin Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tertentu.²³Data yang diperoleh dari membaca buku, jurnal, dan artikel.

5. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian, berupa manusia, gejala, benda, pola sikap, tingkah laku, dan sebagainya yang menjadi obek penelitian.²⁴Menurut Ismiyanto, populasi adalah keseluruhan subjek atau totalitas subjek penelitian yang dapat berupa; orang, benda, suatu hal yang di dalamnya dapat diperoleh dan atau dapat diberikan informasi (data) penelitian.²⁵Populasi dalam sampel ini adalah orang yang terlibat dalam pengendalian pencemaran udara PLTU berdasarkan Perda No. 2 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan di Kota Sawahlunto Kecamatan Talawi.

Sampel penelitian adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.²⁶

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penulisan ini adalah *Purposive Sampling*. Yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu, dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun sampel yang digunakan yaitu (1 orang) Kepala bagian

²³ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Publik Relation Dan Komunikasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm:138

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (suatu pendekatan praktik)*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2013), cet. Ke-5, hlm.173

²⁵ Sandu Siyoto, dkk, *Dasar Metodologi Penelitian*, Cet.1, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 63

²⁶ *Ibid.* Hlm : 174

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto, (1 orang) Kepala seksi Pengawasan dan Pemulihan Lingkungan Hidup,(1 orang) Kasi Tata Lingkungan, (1 orang) UPTD Laboratorium Lingkungan, (1 orang)Manager bagian Keuangan dan Umum PLTU Sijantang, (1 orang) Bagian Pelaksana Lingkungan, (1 orang) Kepala Desa Sijantang, masyarakat Sijantang yaitu sebanyak 8 orang.

6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian,yaitu:

- a. Observasi,yaitu pengumpulan data melalui observasi terhadap objek pengamatan dengan langsung hidup bersama, merasakan serta berada dalam aktivitas kehidupan objek pengamatan. Dengan demikian, pengamat betul-betul menyelami kehidupan objek pengamat, bahkan mengambil bagian dalam kehidupan budaya mereka.²⁷ Penelitian ini untuk melihat bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup terhadap pencemaran udara PLTU Sijantang.
- b. Wawancara,yaitu salah satu metode dengan pengumpulan data melalui komunikasi,yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (informan).²⁸Yang akan diwawancara Kepala bagian Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto, Kepala seksi Pengawasan dan

²⁷Op.cit, Burhan Bungin, hlm: 108

²⁸Rianto Adi,*Metodologi Sosial dan Hukum*,(Jakarta: Granit, 2004), cet.ke-1,h.72.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemulihan Lingkungan Hidup, Kasi Tata Lingkungan, UPTD Laboratorium Lingkungan, Asistant Manager bagian Pengelola Lingkungan PLTU Sijantang, Bagian Lingkungan, Kepala Desa Sijantang, masyarakat Sijantang yaitu sebanyak 8 orang. Dokumentasi,yaitupenelitian yang menggunakan barang-barang tertulis sebagai sumber data, misalnya buku-buku, majalah, dokumen, jurnal, dan peraturan-peraturan lainnya.

- c. Dokumentasi,yaitu penelitian yang menggunakan barang-barang tertulis sebagai sumber data, misalnya buku-buku, majalah, dokumen, jurnal, dan peraturan-peraturan lainnya.
- d. Pustaka, yaitu sumber data yang diperoleh dari penelitian terdahulu dan buku-buku yang terkait dengan Pengendalian Pencemaran Udara yang akan menjadi sumber data peneliti.

7. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif.Artinya,data yang diperoleh diolah secara sistematis. Prosesnya melalui tiga tahap yaitu mereduksi data,menyajikan data,dan menarik kesimpulan. Kegiatan tersebut terus menerus dilakukan sehinggamembentuk siklus yang memungkinkan hasil kesimpulan yang memadai, sehingga proses siklus dapat saling berhubungan secara sistematis.²⁹

²⁹Lexy.J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif* ,(Bandung: Rosda Karya,2000), cet.ke-11 dan 12.

G. Sistemika Penulisan

Penulisan skripsi ini dibagi kepada 5 bab. Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua menampilkan gambaran umum Kecamatan Talawi, gambaran umum organisasi Badan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto, tujuan pokok dan fungsi dari Badan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto, data mata pencarian masyarakat Talawi, upaya pemerintah Kota Sawahlunto dalam pengendalian pencemaran udara, faktor penghambat upaya pemerintah Kota Sawahlunto dalam pengendalian pencemaran udara.

Bab ketiga menjelaskan tentang pengertian Fiqh Siyasah dan ruang lingkupnya, Pemerintah Daerah dalam Fiqh Siyasah, pencemaran udara dan jenis pencemaran udara, pengendalian pencemaran udara, indeks pencemar, pengendalian lingkungan hidup dalam peraturan daerah nomor 2 tahun 2013, dan syariat islam terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Bab keempat merupakan bab inti dalam skripsi ini. Dalam bab ini diuraikan tentang upaya pemerintah daerah Kota Sawahlunto dalam pengendalian pencemaran udara di kecamatan talawi, faktor penghambat dan faktor pendukung upaya pemerintah kota sawahlunto dalam pengendalian pencemaran udara, dan pandangan fiqh siyasah terhadap upaya pemerintah daerah dalam pengendalian pencemaran udara.

Bab kelima ini penulis menguraikan tentang kesimpulan dan saran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Talawi

1. Geografi

Kecamatan Talawi merupakan satu dari 4 kecamatan di Kota Sawahlunto, Sumatera Barat. Kecamatan ini terletak 0.46° Lintang Selatan dan 100.2° Bujur Timur. Berbatasan dengan :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan kecamatan Padang Ganting (Kabupaten Tanah Datar)
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Barangin
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Barangin
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Sumpur Kudus (Kabupaten Sijunjung)

Luas Kecamatan Talawi 99,39 km², terdiri dari 11 desa di kecamatan ini yaitu Batu Tanjung, Bukit Gadang, Sijantang Koto, Data Mansiang, Kumbayau, Rantih, Salak, Mansiang, Sikalang, Talawi Hilie, Talawi Mudiak, dan Tumpuak Tangah.³⁰

2. Iklim

Secara umum iklim Kecamatan Talawi sama dengan kondisi iklim di Kecamatan-Kecamatan lainnya di wilayah Kota Sawahlunto. Yang mana kondisi iklim tersebut adalah iklim tropis dengan kisaran

³⁰<https://langgam.id/kecamatan-talawi-kota-sawahlunto/> diakses pada Tanggal 10 Februari 2021 Pukul 15.35 Wib

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suhu umum 22,5°C dan maksimum 27,5°C.³¹ Sepanjang tahun terdapat dua musim,yaitu musim hujan daribulan November sampai Juni dan musim kemarau dari bulan Juli sampai Oktober. Tingkat curah hujan kota Sawahlunto mencapai rata-rata 1.071,6 mm per tahun dengan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember.

3. Penduduk dan Mata Pencaharian

Tabel II.1
Jumlah Penduduk Kecamatan Talawi

NO	DESA/KELURAHAN	JUMLAH (JIWA)		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Talawihilie	2,133	2,085	4,218
2	Talawimudiak	1,600	1,534	3,134
3	Bukitgadang	788	738	1,526
4	Batutanjung	1,112	1,050	2,162
5	Kumbayau	901	869	1,770
6	Tumpuktangah	1,134	1,103	2,237
7	Datamansiang	100	111	211
8	Sijantangkoto	635	636	1,271
9	Salak	725	719	1,444
10	Sikalang	899	902	1,801
11	Rantih	354	327	681
	Talawi	10,381	10,074	20,455

Sumber:Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto2020

Desa yang menjadi tempat objek penelitian penulis sendiri adalah

Desa Sijantang Koto yang mana terdapat sebuah PLTU Ombilin.

³¹https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kota_Sawahlunto diakses pada Tanggal 10 Februari 2021 Pukul 16.00 Wib

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel II.2
Mata Pencapaian Kecamatan Talawi

NO	PEKERJAAN	JENISKELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Belum/Tidakbekerja	2,334	1,938	4,272
2	Aparatur/Pejabat Negara	378	545	923
3	Tenagapengajar	16	97	113
4	Wiraswasta	3,706	473	4,179
5	Pertanian/Peternakan	1,419	75	1,494
6	Agamadankepercayaan	6	0	6
7	Pelajar/Mahasiswa	2,302	2,221	4,523
8	Tenagakesehatan	5	33	38
9	Pensiunan	204	134	338
10	Lainnya	11	4,558	4,569
	Talawi	10,381	10,074	20,455

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto 2020

Dampak pencemaran udara pltu sangat dirasakan oleh kelompok tani, yang mana dari hasil wawancara dengan bapak Zulkarnain kurang bagus hasil padi yang di panen dari biasanya karena padi mengalami kekeringan jika terkena abu dari pltu.³² Begitu juga dari segi kesehatan, banyaknya masyarakat yang terkena ISPA yang mana pada tahun 2018 ada 2577 orang dan di tahun 2019 menjadi 3570 orang.³³

UIN SUSKA RIAU

³²Wawancara dengan Zulkarnain, tanggal 9 Juni 2021 di Talawi.

³³Sumber dari Puskesmas Talawi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Visi dan Misi Kecamatan Talawi

a. Visi

“Menjadi Kecamatan terbaik dalam pelayanan guna mewujudkan masyarakat yang produktif, mandiri, religious, dan sejahtera”

b. Misi

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.
- 2) Meningkatkan kualitas aparatur pemerintah Kecamatan dan desa.
- 3) Mengembangkan usaha ekonomi masyarakat agar lebih produktif dan sejahtera.
- 4) Mengembangkan kehidupan keagamaan dan adat di tengah-tengah masyarakat guna menciptakan masyarakat yang religious dan berakhlak mulia.
- 5) Mengembangkan kegiatan olahraga ditengah-tengah masyarakat guna mewujudkan masyarakat yang sehat dan produktif.
- 6) Menciptakan Kecamatan terbersih dan terindah guna mendukung kepariwisataan.³⁴

B. Gambaran Umum Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup

1. Sejarah Berdirinya

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2001 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota

³⁴ Sumber: Kantor Camat Talawi Kota Sawahlunto, Camat Talawi, 2021

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sawahlunto Tahun 2001 Nomor 6 Seri D.5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 9 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2002 Nomor 13 Seri D.8) merupakan titik awal dibentuknya organisasi yang mengelola Pengendalian Lingkungan Hidup di Kota Sawahlunto merupakan salah satu Bagian dari Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto yaitu Bagian Pengawasan Lingkungan Hidup dan Perekonomian.

Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2005 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2005 Nomor 1 Seri D.1) Bagian Pengawasan Lingkungan Hidup dan Perekonomian dipisah dari Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto dengan dibentuknya Dinas tersendiri yaitu Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan.

Dengan adanya Regulasi di bidang perlindungan pada Bidang Lingkungan Hidup maka pada tahun 2008 dilakukan perubahan nomenklatur Dinas dari semula Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan dirubah menjadi Badan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Struktur dan Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Sawahlunto.

Berdasarkan :

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- b. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
- c. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14);
- d. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017 Nomor 41);
- e. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertahanan dan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akhir tahun 2016 Badan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto berubah nama menjadi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertahanan dan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto.³⁵

2. Visi Misi

a. Visi :

“Dengan Kebersamaan Kita Wujudkan Sawahlunto Sebagai Kota Wisata Yang Kreatif, Inovatif, Unggul, Bermartabat, Berkeadilan Dan Sejahtera”

b. Misi:

- 1) Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
- 2) Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman

3. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

a. Bidang Lingkungan Hidup

Dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengendalian Lingkungan Hidup, pengendalian pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Bidang Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- 1) Pencegahan pencemaran dan/atau Kerusakan lingkungan hidup;
- 2) Penyelesaian pengaduan masyarakat dibidang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup;

³⁵ Sumber: Kantor Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto, Kepala Sub Bagian Umum, 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Penyusunan rencana kebijakan dan program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- 4) Penyelenggaraan izin lingkungan dan izin PPLH;
- 5) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat;
- 6) Pembinaan pengawasan dan penegakan hukum terhadap usaha atau kegiatan yang dilengkapi yang dilengkapi dokumen lingkungan;
- 7) Pengelolaan keanekaragaman hayati;
- 8) Pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan hidup;
- 9) Pelaksanaan koordinasi pengawasan dan pemulihan lingkungan;
- 10) Pembagian tugas kepada bawahan dalam sesuai ketentuan yang berlaku dengan member arahan sesuai bidang tugasnya;
- 11) Penyampaian laporan secara rutin dan berkala kepada Kepala Dinas; dan
- 12) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya;

b. Seksi Perencanaan dan Tata Lingkungan

Dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang mempunyai tugas pokok

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyusun rencana kegiatan dibidang tata lingkungan berdasarkan rencana dan kebutuhan.³⁶

Untuk melaksanakan tugas pokok, Seksi Perencanaan dan Tata Lingkungan mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan kebijakan teknis pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- 2) Pendataan kegiatan wajib dokumen lingkungan;
- 3) Pengkoordinasian pembinaan teknis penyusunan dan evaluasi dokumen lingkungan;
- 4) Pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup terhadap masyarakat;
- 5) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan lingkungan hidup terhadap masyarakat;
- 6) Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis prosedur dan mekanisme penegakan hukum lingkungan;
- 7) Pelaksanaan koordinasi pembinaan hukum dan perizinan dibidang pengelolaan lingkungan hidup;
- 8) Pelaksanaan rapat tim teknis penyusunan dokumen lingkungan;
- 9) Pembagian tugas kepada bawahan dalam sesuai ketentuan yang berlaku dengan member arahan sesuai bidang tugasnya;
- 10) Penyampaian laporan secara rutin dan berkala kepada Kepala Bidang; dan

³⁶Sumber: Kantor Dinas Perumahan Kawasan Permukiman,Pertanahan,Dan Lingkungan Hidup (DPKP2LH) Kota Sawahlunto, Kasubag Umum, 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya;

c. Seksi Pengawasan, Pemulihan dan Lingkungan Hidup

Dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang mempunyai Tugas Pokok menyusun rencana kegiatan dibidang Pengawasan, Pemulihan dan Lingkungan Hidup berdasarkan rencana dan kebutuhan.

Untuk melaksanakan tugas pokok Seksi Pengawasan, Pemulihan dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:³⁷

- 1) Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan dokumen kualitas lingkungan dan SLHD;
- 2) Perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- 3) Pelaksanaan koordinasi kebijakan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pemulihan lingkungan;
- 4) Pembagian tugas kepada bawahan dalam sesuai ketentuan yang berlaku dengan member arahan sesuai bidang tugasnya;
- 5) Penyampaian laporan secara rutin dan berkala kepada Kepala Bidang; dan
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya;

³⁷ Sumber: Kantor Dinas Perumahan Kawasan Permukiman,Pertanahan,Dan Lingkungan Hidup (DPKP2LH) Kota Sawahlunto, Kasi Pengawasan dan Pemulihan Lingkungan Hidup, 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis daerah pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertahanan dan Lingkungan Hidup secara professional sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Unit Pelaksana Teknis Dinas

- 1) UPTD Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Susunan organisasi UPTD Rumah Susun Sederhana Sewa terdiri dari:³⁸
 - a) Kepala UPTD Rumah Susun Sederhana Sewa;
 - b) Sub Bagian Tata Usaha dan
 - c) Kelompok jabatan fungsional

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan umum kepegawaian, keuangan perencanaan, evaluasi dan pelaporan UPTD Rumah Susun Sederhana Sewa.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi sebagai berikut:

³⁸ Sumber: Kantor Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan, Dan Lingkungan Hidup (DPKP2LH) Kota Sawahlunto, Kasubag Umum, 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Perencanaan operasional urusan umum, kepegawaian keuangan, ketatalaksanaan, ketatausahaan serta evaluasi dan pelaporan UPTD Rumah Susun Sederhana Sewa;
 - b) Pengkoordinasian urusan umum, kepegawaian, keuangan, ketatalaksanaan, ketatausahaan dan evaluasi serta pelaporan UPTD Rumah Susun Sederhana Sewa;
 - c) Pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan UPTD Rumah Susun Sederhana Sewa;
 - d) Pengelolaan urusan umum, kepegawaian, ketatalaksanaan, keuangan dan ketatausahaan UPTD Rumah Susun Sederhana Sewa;
 - e) Pengelolaan informasi public UPTD Rumah Susun Sederhana Sewa; dan
 - f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- 2) UPTD Laboratorium Lingkungan
- Susunan organisasi UPTD Laboratorium Lingkungan terdiri dari :³⁹
- a) Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan;
 - b) Sub Bagian Tata Usaha dan
 - c) Kelompok jabatan fungsional

³⁹ Sumber: Kantor Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan, Dan Lingkungan Hidup (DPKP2LH) Kota Sawahlunto, UPTD Laboratorium Lingkungan, 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pengelolaan laboratorium lingkungan dengan fungsi sebagai berikut :

- a) Pengelolaan laboratorium lingkungan;
- b) Pelayanan pengujian parameter kualitas air sungai, limbah, tanah dan emisi udara;
- c) Pelayanan pengaduan masyarakat terkait pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
- d) Penyediaan data dan informasi parameter kualitas air sungai, limbah, tanah dan emisi udara;
- e) Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program/ kegiatan, pelaporan dan pendokumentasian program/kegiatan, pengelolaan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga UPTD Laboratorium Lingkungan
- f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas. Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinir dan melaksanakan pengelolaan laboratorium lingkungan.⁴⁰

⁴⁰ Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Penyusunan program/kegiatan UPTD Laboratorium Lingkungan;
- b) Pelaksanaan program/kegiatan UPTD Laboratorium Lingkungan;
- c) Penyelenggaraan evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan UPTD Laboratorium Lingkungan;
- d) Pengelolaan urusan ketatausahaan UPTD Laboratorium Lingkungan; dan
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan. Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan umum kepegawaian, keuangan perencanaan, evaluasi dan pelaporan UPTD Laboratorium Lingkungan.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang












1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Perencanaan operasional urusan umum, kepegawaian keuangan, ketatalaksanaan, ketatausahaan serta evaluasi dan pelaporan UPTD Laboratorium Lingkungan;
- b) Pengkoordinasian urusan umum, kepegawaian, keuangan, ketatalaksanaan, ketatausahaan dan evaluasi serta pelaporan UPTD Laboratorium Lingkungan;
- c) Pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan UPTD Laboratorium Lingkungan;
- d) Pengelolaan urusan umum, kepegawaian, ketatalaksanaan, keuangan dan ketatausahaan UPTD Laboratorium Lingkungan;
- e) Pengelola informasi public UPTD Laboratorium Lingkungan; dan
- f) Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh atasan.⁴¹

⁴¹ Sumber: Kantor Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan, Dan Lingkungan Hidup (DPKP2LH) Kota Sawahlunto, Kasubag Umum, 2021

4. Standard Operating Procedure (SOP) Pengawasan Lingkungan Hidup

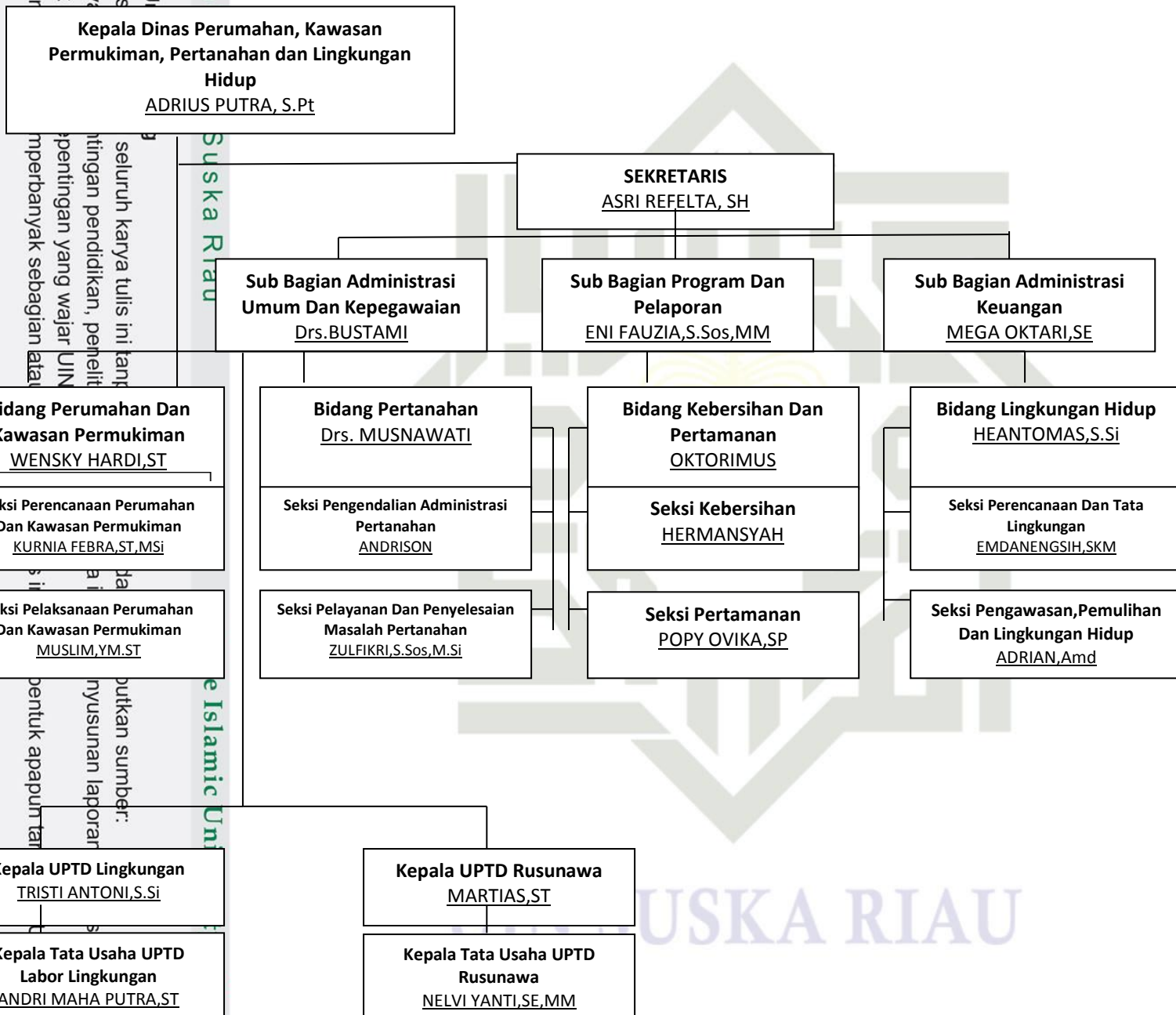
FLOW CHART STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENGAWASAN LINGKUNGAN HIDUP
SEKSI PENGAWASAN PEMULIHAN LINGKUNGAN HIDUP

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Kadis	Kabid	Kasi	Staf	Tim Pengawasan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyiapkan rencana kerja pengawasan dan objek yang akan diawasi						Worksheet daftar inventarisasi objek pengawasan	1 hari	Kerangka Acuan Kerja Rencana Pengawasan Lingkungan Hidup	
2	Menugaskan staf untuk mempersiapkan bahan administrasi instrumen pengawasan						KAK Pengawasan Lingkungan Hidup	2 jam	Arahan penugasan staf untuk melakukan penyiapan kelengkapan administrasi pengawasan LH	
3	Melakukan persiapan administrasi kelengkapan instrumen pengawasan LH serta melaporkan hasilnya kepada Kasi						Peraturan Perundang-undangan terkait pengawasan LH, ATK, Printer dan Komputer	1 hari	Bahan administrasi pengawasan LH, Berita Acara Pengawasan dan konsep surat perintah tugas	
4	Mempelajari hasil persiapan kelengkapan administrasi yang dilakukan oleh staf, jika telah lengkap diteruskan ke Kabid untuk menyetujui pelaksanaan pengawasan oleh tim pengawasan LH melalui Surat Perintah Tugas						Hasil evaluasi kelengkapan administrasi pelaksanaan pengawasan LH	2 jam	Nota Dinas pelaksanaan pengawasan LH ke Kabid	
5	Mempelajari usulan Kasi dan menugaskan Kasi untuk melaksanakan kegiatan pengawasan LH bersama tim pengawasan						Nota Dinas Persetujuan Kabid untuk melaksanakan pengawasan	1 jam	Disposisi berupa surat perintah penugasan untuk melaksanakan pengawasan LHI	
6	Melaksanakan kegiatan pengawasan LH						Surat Perintah Tugas, Alat Pelindung Diri	1 hari	Berita Acara Hasil Pengawasan LH	
7	Melaporkan hasil pengawasan LH Ke Kadis melalui Kabid						Berita Acara Hasil Pengawasan	2 hari	Laporan Hasil Pengawasan LH	
8	Menerima hasil laporan pelaksanaan pengawasan LH dan Tindak lanjut hasil pengawasan						Laporan hasil pengawasan LH	2 jam	Data hasil pengawasan dan saran tindak lanjut hasil pengawasan	
Total waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup								5 hari 7 jam		

Sumber: Adrian Bagian Kasi Pengawasan dan Pemulihan Lingkungan Hidup

5. Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan, Dan Lingkungan Hidup (DPKP2LH) Kota Sawahlunto



Sumber: *Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Pencemaran Udara

1. Pengertian Pencemaran Udara

Udara adalah campuran dari berbagai gas secara mekanis dan bukan merupakan senyawa kimia. Udara merupakan komponen yang membentuk atmosfer bumi, yang membentuk zona kehidupan pada permukaan bumi. Udara terdiri dari berbagai gas dalam kadar yang tetap pada permukaan bumi, kecuali gas metana, ammonia, hydrogen sulfide, karbon monoksida dan nitrogen oksida mempunyai kadar yang berbeda-beda tergantung daerah/lokasi. Umumnya konsentrasi etana, ammonia, hydrogen sulfida, karbon monoksida dan nitrooksida sangat tinggi di areal rawa-rawa atau industri kimia. Unsur terpenting dari udara untuk kehidupan adalah oksigen. Jumlah oksigen di dalam maupun di luar ruangan tidak banyak berbeda. Kesulitan bernafas akan dialami makhluk hidup yang membutuhkan oksigen jika konsentrasi oksigen di dalam maupun di luar ruangan berkurang karena meningkatnya konsentrasi CO₂.⁴²

Udara ambient berdasarkan Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara adalah udara bebas dipermukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada di dalam wilayah

⁴² Philip Kristianto, *Ekologi Industri*, (Yogyakarta: ANDI, 2002)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yuridis Republik Indonesia yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur lingkungan hidup lainnya.

Berbagai kegiatan manusia, baik disengaja atau tidak dapat menyebabkan pencemaran udara. Secara alamiah, sebenarnya alam (termasuk udara) mempunyai mekanisme pembersihan diri (self purification), antara lain siklus hidrologi yang dapat membersihkan atmosfer. Alam juga telah menyediakan unsur- unsur dasar yang dapat dipergunakan untuk kehidupan mikroorganisme yang mampu menguraikan bahan pencemar dalam jumlah yang cukup dan berkelanjutan, namun adanya penambahan pencemaran udara oleh aktivitas manusia maka udara tidak dapat lagi membersihkan dirinya lagi, sehingga bahan pencemar yang ada di udara, melebihi batas dan tidak mampu memenuhi fungsi untuk mendukung kehidupan manusia dan lingkungan.⁴³

Pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukinya zat, energi, dari komponen lain ke dalam udara ambient oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambient tidak dapat memenuhi fungsinya.⁴⁴ Sedangkan menurut Tresna Wijaya, pencemaran udara jika udara di atmosfer dicampuri

⁴³ Kwat Prabowo,dkk, *Penyehatan Udara*, Cet.1,(Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan, 2018)

⁴⁴ Lihat PP No.41 Tahun 1999

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan zat atau radiasi yang berpengaruh jelek terhadap organism hidup.⁴⁵

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dari komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya. Pencemaran udara adalah sebagai adanya bahan-bahan atau zat asing di dalam udara yang menyebabkan perubahan susunan (komposisi) udara dari keadaan normalnya.⁴⁶

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1407 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengendalian Dampak Pencemaran Udara, pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam udara oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan atau mempengaruhi kesehatan manusia. Selain itu, pencemaran udara dapat pula diartikan adanya bahan-bahan atau zat asing di dalam udara yang menyebabkan terjadinya perubahan komposisi udara dari susunan atau keadaan normalnya.

Menurut Chambres yang dimaksud pencemaran udara adalah bertambahnya bahan atau substrat fisik atau kimia ke dalam lingkungan

⁴⁵ Tresna Wijaya, *Pencemaran Lingkungan*, (Jakarta: Rinka Cipta, 2009), h. 192

⁴⁶ Arya Wisnu Wardhana, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, Cet. 3, (Yogyakarta: ANDI, 2004)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

udara normal yang mencapai sejumlah tertentu, sehingga dapat dideteksi oleh manusia (atau dapat dihitung dan diukur) serta dapat memberikan efek pada manusia, binatang, vegetasi dan material.⁴⁷

Adapun pengertian tentang baku mutu udara ambient adalah batas kadar yang diperbolehkan bagi zat atau bahan pencemar terdapat di udara, namun tidak menimbulkan gangguan terhadap makhluk hidup, tumbuh-tumbuhan dan/atau benda sedangkan baku mutu udara emisi adalah batas kadar yang diperoleh bagi zat atau bahan pencemar untuk dikeluarkan dari sumber pencemar ke udara sehingga tidak melampauinya baku mutu udara ambient.⁴⁸

Menurut PP No.41 tahun 1999, sumber pencemaran udara digolongkan atas lima, yaitu:⁴⁹

a. Sumber bergerak

Sumber bergerak adalah sumber emisi yang bergerak atau tetap pada suatu tempat yang berasal dari kendaraan bermotor.

b. Sumber bergerak spesifik

Sumber bergerak spesifik adalah serupa dengan sumber bergerak namun berasal dari kereta api, pesawat terbang, kapal, laut dan kendaraan berat lainnya.

⁴⁷ HJ.Mukono, 2006, *Prinsip Dasar Kesehatan Lingkungan*, (Surabaya: Airlangga University Press), hlm. 26

⁴⁸ Arif Sumantri, *Kesehatan Lingkungan*, Cet.2,(Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2013)

⁴⁹ PP No.41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Sumber tidak bergerak

Sumber tidak bergerak adalah sumber emisi yang tetap pada suatu tempat.

- d. Sumber tidak bergerak spesifik

Sumber tidak bergerak spesifik adalah serupa dengan sumber tidak bergerak namun berasal dari kebakaran hutan dan pembakaran sampah.

- e. Sumber gangguan

Sumber gangguan adalah sumber pencemar yang menggunakan media udara atau padat untuk penyebarannya, sumber ini berupa dari kebisingan, getaran, kebauan dan gangguan lain.

2. Jenis Pencemaran Udara

Ada beberapa jenis pencemaran udara, yaitu:⁵⁰

- a. Berdasarkan Bentuk

- 1) Gas, adalah uap yang dihasilkan dari zat padat atau zat cair karena dipanaskan atau menguap sendiri.

Contohnya: (karbon dioksida) CO₂, (karbon monoksida) CO, (Sulfur oksida) Sox, (Nitrogen oksida) NO_x.

- 2) Partikel, adalah suatu bentuk pencemaran udara yang berasal dari zarah-zarah kecil yang terdispersi ke udara, baik berupa padatan, cairan, maupun padatan dan cairan secara bersama-sama.

⁵⁰ Pramudya Sunu, *Melindungi Lingkungan dengan Menerapkan ISO 14001*, (Jakarta: PT Grasindo, 2001), h.41

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Contohnya: debu, asap, kabut, dan lain-lain.

b. Berdasarkan Tempat

- 1) Pencemaran udara dalam ruang (indoor air pollution) yang disebut juga dengan udara tidak bebas seperti dirumah, bioskop, sekolah, rumah sakit, dan bangunan lainnya. Biasanya zat pencemarnya adalah asap rokok. Asap yang terjadi di dapur tradisional ketika memasak dan lain sebagainya.
- 2) Pencemaran udara luar ruang (outdoor air pollution) yang disebut juga udara bebas seperti asap-asap dari industry maupun kendaraan bermotor.

c. Berdasarkan gangguan atau efeknya terhadap kesehatan

- 1) Irritansia adalah zat pencemar yang dapat menimbulkan iritasi jaringan tubuh seperti SO_2 , Ozon, dan Nitrogen Oksida.
- 2) Aspeksia adalah keadaan dimana darah kekurangan oksigen dan tidak mampu melepas karbon oksida. Gas penyebab tersebut CO , H_2S , NH_3 , dan CH_4 .

- 3) Anestesia adalah zat yang mempunyai efek membius dan biasanya merupakan pencemaran udara dalam ruang.

Contohnya: Formaldehyde, Alkohol.

- 4) Tokis adalah zat pencemar yang menyebabkan keracunan. Zat penyebabnya seperti timbale, Cadmium, Fluor, Insektisida.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Berdasarkan susunan Kimia
 - 1) Anorganik adalah zat pencemar yang tidak mengandung karbon seperti asbestos, ammonia, asam sulfat, dan lain-lain.
 - 2) Organik adalah zat pencemar yang mengandung karbon seperti pestisida, herbisida, beberapa jenis alcohol dan lain-lain.
- e. Berdasarkan asalnya
 - 1) Primer adalah suatu bahan kimia yang ditambahkan langsung ke udara yang menyebabkan konsentrasinya meningkat dan membahayakan. Contohnya: CO₂ yang meningkat diatas konsentrasi normal.
 - 2) Sekunder adalah senyawa kimia berbahaya yang timbul dari hasil reaksi antara zat polutan primer dengan komponen alamiah.
Contohnya: Peroxy Acetil Nitrat (PAN).

3. Proses Terjadinya Pencemaran Udara

Proses terjadinya pencemaran udara dapat dibagi dalam tiga proses yaitu:

- a. Attrition (gesekan)

Terjadi pada setiap aspek kehidupan mulai dari yang sederhana seperti gesekan sepatu dan rantai, gesekan ban mobil dan jalan raya, sampai ke proses yang lebih kompleks seperti penyebaran partikel-partikel ke udara melalui proses sanding (pemecahan)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

batuan, grinding (pemotongan), drilling (pengeboran) dan spraying (penyemprotan).

b. Vaporization (penguapan)

Adalah suatu bentuk perubahan fase cairan menjadi gas. Perubahan bentuk tersebut dapat disebabkan oleh pengaruh tekanan dan pemanasan.

c. Combustion (pembakaran)

Pencemaran udara dapat bersumber dari pembakaran. Pembakaran bensin dalam kendaraan bermotor merupakan separuh penyebab polusi udara. Pembakaran tersebut dapat berlangsung sempurna maupun yang tidak sempurna yang dapat menimbulkan terjadinya pencemaran.

Berdasarkan ketiga proses tersebut pembakaran merupakan proses yang dominan menimbulkan polutan, sedangkan dari bentuk kegiatannya lalu lintas dan pembangkit listrik adalah kontributor terbesar terhadap pencemaran udara.⁵¹ Bahan polutan yang dihasilkan jika terjadi peningkatan diudara yang melebihi baku mutu udara ambient akan mempengaruhi kualitas lingkungan dan kesehatan manusia.⁵²

⁵¹ Izarul Machdar, *Pengantar Pengendalian Pencemaran: Pencemaran Air, Pencemaran Udara dan kebisingan*, Yogyakarta: Deepublish, 2018, hlm.199

⁵² Mukono, *Aspek Kesehatan Pencemaran Udara*, Surabaya: Pusat Penerbitan dan Penelitian Unair (AUP), 2011, hlm.5

4. Pengendalian Pencemaran Udara

Pengendalian adalah proses pemantauan aktivitas untuk menjamin bahwa standar dapat terlaksana sebagaimana yang direncanakan dan melakukan langkah koreksi terhadap penyimpangan yang berarti.⁵³

Pengertian pengendalian menurut pendapat beberapa para ahli di dunia.⁵⁴

1. Harold Koontz

Pengendalian adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan, agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan dapat terselenggara.

2. G.R Terry

Pengendalian dapat didefinisikan sebagai proses penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apabila perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar.

3. Robert J. Mockler

Upaya sistematis oleh manajemen bisnis untuk membandingkan kinerja dengan standar yang telah ditentukan, rencana, atau tujuan untuk menentukan apakah kinerja sejalan dengan standar tersebut dan mungkin untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan

⁵³ Wendy Sepmady Hutahaean, 2018, *Dasar Manajemen*, (Malang: Ahli media Press), hlm.

⁵⁴ Emilda Sulasmi, 2020, *Manajemen dan Kepemimpinan*, (Depok: Rajawali Pers), hlm. 74

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk melihat bahwa manusia dan sumber daya perusahaan lainnya yang digunakan dengan cara yang paling efektif dan efisien mungkin dalam mencapai tujuan perusahaan.

4. Henri Fayol

Pengendalian suatu usaha terdiri dari melihat bahwa segala sesuatu yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah diadopsi, perintah yang telah diberikan, dan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan adalah penting untuk mengetahui kesalahan agar mereka dapat diperbaiki dan dicegah dari berulang.

5. EFL Breach

Pengendalian adalah perbandingan kinerja saat ini terhadap standar yang telah ditentukan yang terkandung dalam rencana, dengan maksud untuk memastikan kemajuan yang memadai dan kinerja yang memuaskan.

Pengendalian pencemaran udara adalah upaya pencegahan dan atau penanggulangan pencemaran udara serta pemulihan mutu udara. Pengendalian pencemaran udara meliputi pengendalian dari usaha dan/atau kegiatan sumber bergerak, sumber bergerak spesifik, sumber tidak bergerak, dan sumber tidak bergerak spesifik yang dilakukan dengan upaya pengendalian sumber emisi dan/atau sumber gangguan yang bertujuan untuk mencegah turunnya mutu udara ambien.⁵⁵

⁵⁵ PP No 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Pasal 1 angka 16 bahwa “Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup adalah tindakan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi pencegahan, penanggulangan dan pemulihan.”

Menteri melakukan pengawasan terhadap penataan tanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara. Dalam hal wewenang pengawasan diserahkan kepada pemerintah daerah, Gubernur/ Bupati/ Walikota Kepala Daerah tingkat II dapat melakukan pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang membuang emisi dan/atau gangguan. Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari upaya pengendalian pencemaran udara dan/atau gangguan dari sumber tidak bergerak yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha/dan atau kegiatan dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

Setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang mengakibatkan terjadinya pencemaran udara wajib menanggung biaya penanggulangan pencemaran udara serta biaya pemulihannya.

5. Indeks Pencemar

Indeks pencemar terbagi dua yaitu:

- a. Indeks Mutu Udara (ISMU)

Menurut peraturan pemerintah republic Indonesia nomor 41 Tahun 1999 tentang nilai Indeks Mutu Udara (ISMU) merupakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu nilai yang digunakan untuk menentukan mutu udara suatu lokasi. Dalam penentuan status mutu udara kota, data yang digunakan adalah hasil pemantauan primer maupun pemantauan kontinyu yang menggunakan peralatan pemantauan dengan menggunakan metode manual. Pemantauan diambil menggunakan sampel lalu sampel dianalisis lebih lanjut di laboratorium.

b. Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU)

Menurut peraturan pemerintah republic Indonesia nomor 41 Tahun 1999 Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) adalah angka yang tidak mempunyai satuan yang menggambarkan kondisi mutu udara ambient di lokasi tertentu, yang didasarkan kepada dampak terhadap kesehatan manusia, nilai estetika dan makhluk hidup lainnya. Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) diperoleh dari pengoperasian stasiun pemantau kualitas udara ambient secara otomatis dan berkesinambungan. Parameter Indeks Standar Pencemar Udara meliputi:

- a) Partikulat (PM₁₀)
- b) Karbondioksida (CO)
- c) Sulfur dioksida (SO₂).
- d) Nitrogen dioksida (NO₂).
- e) Ozon (O₃)

B. Pengertian Upaya

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), upaya diartikan sebagai usaha, ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya); daya upaya.⁵⁶ Adapun pengertian Upaya menurut para ahli, sebagai berikut:

1. Wahyu Baskoro mengemukakan bahwa Upaya adalah usaha atau syarat untuk menyampaikan sesuatu atau maksud (akal, ikhtiar).⁵⁷
2. Torsina menyatakan bahwa Upaya merupakan kegiatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
3. Sriyanto mengatakan bahwa Upaya ialah usaha untuk mencapai sesuatu yaitu segala usaha agar tidak terjadi kerusakan.⁵⁸

C. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Pembangunan di Kota Sawahlunto dilaksanakan sesuai dengan tujuan pembangunan yang diamanatkan dalam UUD 1945, yakni mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, dengan paradigma pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan merupakan suatu pembangunan yang mengintegrasikan kepentingan lingkungan hidup dalam setiap perbuatan dan pengambilan kebijakan atau keputusan, dengan memperhatikan kebutuhan

⁵⁶ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm.1595

⁵⁷ Wahyu Baskoro, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Setia Kawan, 2005), hlm.902

⁵⁸ Fatta Nur Ardiansyah, Skripsi: “Upaya Pencegahan Kerusakan Muatan Dingin dan Beku di IV Meratus Medan I”, (Semarang, PIP, 2017), hlm. 8-9

masyarakat masa kini dan generasi yang akan datang. Pelaksanaan pembangunan memiliki dampak positif dan negatif.

Dampak positif pembangunan adalah terwujudnya peningkatan kualitas hidup manusia dan lingkungan hidupnya, sedangkan dampak negatifnya adalah antara lain, berupa pencemaran dan kerusakan lingkungan, harus dikendalikan, agar terwujud pelestarian fungsi lingkungan hidup di Kota Sawahlunto.

Pengaturan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dalam Peraturan Daerah ini didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dijiwai oleh semangat otonomi daerah. Dalam hal pengaturan mengenai sarana (instrument) pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, peraturan daerah ini telah berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di dalam Pasal 3 Undang- Undang tersebut dijelaskan tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah :

1. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
2. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
3. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
4. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
5. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
6. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

8. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
9. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
10. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
10. Mengantisipasi isu lingkungan global.

Dan adapun Pasal 26 dijelaskan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan dokumen Amdal, yaitu :

1. Dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat.
2. Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan.
3. Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Yang terkena dampak;
 - b. Pemerhati lingkungan hidup; dan/atau
 - c. Yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses amdal.
4. Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen amdal.

Dan untuk melengkapi peraturan tentang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup secara operasional, juga diatur ketentuan secara sistematis dalam peraturan pemerintah, peraturan menteri.

Berikut peraturan mengenai pencemaran udara:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

Keputusan Kepala Bapedal Nomor KEP-107/BAPEDAL/11/1997 tentang Pedoman Teknis Perhitungan dan Pelaporan Serta Informasi Indeks Standar Pencemar Udara.

Peraturan MENLH Nomor 04 Tahun 2011 tentang Standar Kompetensi dan Sertifikasi Kompetensi Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Udara.

5. Peraturan MENLH Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara di Daerah.

6. Peraturan MENLH Nomor 07 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Ketel Uap

Peraturan MENLH Nomor 04 Tahun 2011 tentang Standar Kompetensi dan Sertifikasi Kompetensi Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Udara.

Sarana pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang dibuat dalam pasal-pasal peraturan daerah ini tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Namun demikian, sebagai suatu Peraturan Daerah, pengaturan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dalam peraturan daerah ini, disesuaikan dengan

karakteristik daerah, baik menyangkut wewenang, substansi, mekanisme/tata laksananya dan media lingkungan hidupnya.

Kemudian, di dalam peraturan daerah ini sudah dijelaskan mengenai hak dan kewajiban bagi masyarakat terhadap pengendalian pencemaran udara. Sebagaimana terdapat dalam Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Pasal 5 tentang Hak dan Kewajiban Masyarakat sebagai berikut:

Setiap orang dan/atau badan mempunyai hak yang sama untuk:

- a. Tercegahnya lingkungan hidup dari pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- b. Tertanggulangnya lingkungan hidup yang mengalami pencemaran dan Kerusakan;
- c. Terpulihkannya lingkungan hidup yang mengalami pencemaran dan kerusakan;
- d. Mendapatkan informasi mengenai pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- e. Melaporkan secara tertulis kepada Walikota dapat melalui Kepala Desa/Lurah, Camat dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Bidang Lingkungan Hidup, apabila menduga dan/atau mengetahui terjadinya pelanggaran terhadap pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setiap orang dan/atau badan berkewajiban berperan serta dalam:

- a. Melakukan upaya pencegahan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Melakukan upaya penanggulangan terhadap lingkungan hidup di daerah yang tercemar dan rusak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Melakukan upaya pemulihan terhadap lingkungan hidup di daerah yang tercemar dan rusak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Melindungi dan menjaga pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Wewenang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di Kota Sawahlunto dimiliki oleh Walikota. Kewenangan Walikota dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di Kota Sawahlunto merupakan salah satu wujud dari implementasi desentralisasi pengelolaan lingkungan hidup di daerah. Substansi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup merupakan isi atau norma-norma dalam batas-batas desentralisasi pengendalian lingkungan hidup yang bertujuan agar pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup itu dapat dikendalikan. Mekanisme adalah tata laksana dalam melaksanakan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan media lingkungan hidup adalah unsur-unsur lingkungan hidup, yang pada dasarnya berupa air, udara dan tanah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tata laksana pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dalam pasal 13 yaitu:

- a. Pemeriksaan terhadap kepemilikan Perizinan Lingkungan yang diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. pemeriksaan terhadap kepemilikan AMDAL atau UKL-UPL atau surat pernyataan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pemeriksaan terhadap pemenuhan persyaratan Perizinan Lingkungan yang diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. pemantauan terhadap pelaksanaan Perizinan Lingkungan yang diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. penilaian terhadap kesesuaian pelaksanaan usaha dan atau kegiatan dengan Perizinan Lingkungan, dan AMDAL atau UKL-UPL atau surat pernyataan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. pemeriksaan terhadap kepemilikan sarana dan prasarana dalam melakukan pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. laporan dari masyarakat atas terjadinya pelanggaran terhadap kepemilikan, persyaratan dan pelaksanaan segala

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PerizinanLingkungan yang diwajibkan menurut peraturan perundang-undanganyang berlaku;

- h. laporan dari masyarakat atas terjadinya pelanggaran yangdilakukan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan terhadap upayapencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

D. Fiqh Siyasah dan Ruang Lingkupnya

1. Pengertian Fiqh Siyasah

Kata Fiqh berasal dari faqaha-yafqahu-fiqhan.Secara bahasa, pengertian Fiqh adalah “paham yang mendalam”.Secara terminologis (istilah), menurut ulama – ulama syara, *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum – hukum yang sesuai dengan syara mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil yang tafshil (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar – dasarnya dan sunah). Jadi fiqh adalah pengetahuan mengenai hukum agama islam yang bersumber dari al quran dan sunah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad.

Fiqh mencakup berbagai aspek kehidupan manusia.Di samping mencakup pembahasan tentang hubungan antara manusia dengan Tuhannya (ibadah), fiqh juga membicarakan aspek hubungan antara sesama manusia secara luas (muamalah). Aspek muamalah ini pun dapat dibagi lagi menjadi jinayah (pidana), munakahat (perkawinan), mawaris (kewarisan), murafa’at (hukum acara), siyasah (politik/ketatanegaraan)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan al-ahkam al-dualiyah (hubungan internasional).⁵⁹“siyasah” berasal dari kata *sasa-yasusu-siyasatan* yang artinya mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan”. Oleh karena itu, berdasarkan pengertian harfiah, kata as-siyasah berarti pemerintah pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan, pengawasan, perekayasaan, dan arti-arti lainnya.⁶⁰

Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah “pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.” Adapun Ibn Manzhur mendefenisikan siyasah “mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.” Defenisi yang bernuansa religius dikemukakan oleh Ibnu Qayyim al-Jawziyah.⁶¹ Menurutny, siyasah adalah “suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kebinasaan, meskipun perbuatan tersebut tidak ditetapkan oleh Rasulullah SAW atau diwahyukan oleh Allah SWT.⁶²

Jadi pengertian fiqh siyasah adalah suatu konsep yang berguna untuk mengatur hukum ketatanegaraan dalam bangsa dan negara yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.

⁵⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah: kontekstualisasi doktrin politik islam* (Jakarta: Pradamedia Group 2014), h.2

⁶⁰ A.Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), cet. ke-6, h.25-26

⁶¹ *Ibid*, h.27-28

⁶² Muhammad Iqbal, *op.cit.* h.4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Ada beberapa macam fiqh siyasah ini, dan memiliki berbagai pendapat. Lebih lanjut, disebutkan bahwa *fiqh siyasah* dapat dipersempit meliputi empat bidang, yaitu *fiqh siyasah dusturiyah*, mencakup (*siyasah tasyri'iyah*, *siyasah qadha'iyah*, *siyasah iddariyyah*, *siyasah tanfidziyah*), *fiqh siyasah dauliyah/kharijiyah*, *fiqh siyasah maliyah*, *fiqh siyasah harbiyah*.⁶³

Berkenaan dengan luasnya objek kajian *fiqh siyasah*, maka dalam tahap perkembangan fiqh siyasah dewasa ini, dikenal beberapa pembedaan fiqh siyasah. Salah satu ulama terkemuka di Indonesia T.M. Hasbi Ash- Shiddieqy malah membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bidang, yaitu:⁶⁴

- a. *Siyasah Dusturiyah Syar'iyah* (Politik Pembuatan Perundang-Undangan)
- b. *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah* (Politik Hukum)
- c. *Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah* (Politik Ekonomi dan Moneter)
- d. *Siyasah Malliyah Syar'iyah* (Politik Ekonomi dan Moneter)
- e. *Siyasah Idariyyah Syar'iyah* (Politik Administrasi Negara)
- f. *Siyasah Dauliyyah/ Siyasah Kharijiyah Syar'iyah* (Politik Hubungan Internasional)

⁶³ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Ed. 1, Cet. 5, 2002), hlm. 40

⁶⁴ Muhammad Iqbal, *Op cit*, hlm 15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* (Politik Pelaksanaan Perundang-Undangan)
- h. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* (Politik Penerapan)

Contoh lain dari pembidangan fiqh siyasah terlihat dari kurikulum fakultas syariah, yang membagi fiqh siyasah ke dalam 4 bidang, yaitu:⁶⁵

- a. *Fiqh Dustury*
- b. *Fiqh Mally*
- c. *Fiqh Dawly*
- d. *Fiqh Harbiy*

Dalam tulisan ini, berkenaan dengan pola hubungan antar manusia yang menuntut pengaturan siyasah, dibedakan:

Pertama, *Fiqh siyasah dusturiyyah*, yang mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara yang lain dalam batas-batas administratif suatu negara. Kedua, *fiqh siyasah maliyyah*, yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan, pengeluaran uang milik negara. Ketiga, *Fiqh siyasah dawliyyah*, yang mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara dari negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara dari negara lain. Keempat, *Fiqh siyasah harbiyyah*, yang mencakup persoalan dan ruang lingkup pembahasannya tentang arti, tujuan dan macam-macam peperangan dalam islam.

⁶⁵ H.A. Djazuli, *Op.cit* hlm. 31

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan perbedaan para ulama, pembagian fiqh siyasah dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok, yaitu:

- a. Siyasah Dusturiyah disebut juga politik perundang-undangan. Yang mana bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (tasyri'iyah) oleh lembaga legislatif, peradilan (qadha'iyah) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (idariyyah) oleh birokrasi atau eksekutif.
- b. Siyasah Dauliyah/Siyasah Kharijiyah, disebut juga politik luar negeri. Yang mana mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga negara. Di bagian ini ada politik masalah peperangan (siyasah harbiyah), yang mengatur ketika berperang, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang, dan gencatan senjata.
- c. Siyasah Maliyah, disebut juga politik keuangan dan moneter. Yang mana membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional kepentingan/hak-hak public, pajak, dan perbankan.⁶⁶

3. Sumber Kajian Fiqh Siyasah

Sebagai salah satu cabang dari disiplin ilmu fiqh, *siyasah* mempunyai sumber-sumber yang dapat dirujuk dan menjadi pegangan. Secara garis besar, sumber fiqh siyasah dapat dibagi menjadi dua yaitu,

⁶⁶ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin*, op.cit..h.15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sumber primer dan sumber sekunder. Fathiyah al-Nabrawi membagi sumber-sumber fiqh siyasah menjadi tiga bagian, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah, sumber-sumber tertulis selain Al-Qur'an dan Sunnah, serta sumber-sumber yang berupa peninggalan kaum muslimin terdahulu.

Selain sumber AL-Qur'an dan Sunnah, Ahmad Sukardja mengungkapkan sumber kajian *fiqh siyasah* berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya, seperti pandangan para pakar politik, 'Urf atau kebiasaan masyarakat yang bersangkutan, adat-istiadat setempat, pengalaman masa lalu dan aturan-aturan yang pernah dibuat sebelumnya.

Metode kajian fiqh siyasah tidak berbeda dengan metode yang digunakan dalam mempelajari fiqh pada umumnya, yaitu metode ushul fiqh dan kaidah-kaidah fiqh yang sudah teruji keakuratannya dalam menyelesaikan berbagai masalah. Metode ushul fiqh antara lain adalah *qiyas, istihsan, 'urf, 'adah, mashlahah mursalah, dan istishab*. Dengan metode ini, umat islam memberikan kebebasan berpikir bagi penggunanya.⁶⁷

4. Fiqh Siyasah Dusturiyyah

a. Pengertian Siyasah Dusturiyyah

Kata “dusturi” berasal dari bahasa Persia. Semula, artinya “seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama”. Dalam perkembangan selanjutnya, kata dusturi digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster

⁶⁷ Suyuthi Pulungan, *Op cit*, hlm. 30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata dustur berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, dustur berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi).⁶⁸

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atau hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hupkum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.⁶⁹

Permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Sudah tentu ruang lingkup pembahasannya sanpgat luas. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

⁶⁸ H. Boedi Abdullah, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, (Bandung : Pustaka Setia, 2012), hlm.19

⁶⁹ *Op.cit*, Muhammad Iqbal, hlm.178

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. A. Djazuli mempetakan bidang Siyasah Dusturiyyah menyangkut persoalan:

- 1) Persoalan imamah, hak, dan kewajibannya;
- 2) Persoalan rakyat, statusnya, dan hak-haknya;
- 3) Persoalan *bai'at*;
- 4) Persoalan *waliyul ahdi*;
- 5) Persoalan perwakilan;
- 6) Persoalan *ahlul halli wal aqdi*;
- 7) Persoalan *wuzaroh dan perbandingannya*.

Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan fiqh siayasah dusturiyah umumnya mengacu pada dalil-dalil kully yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah serta maqasid syariah yang menjadi ide dasar pengetahuan tentang pengaturan kehidupan kemasyarakatan kaitannya dengan pemerintahan. Semangat ajaran Islam didalam dalil kully dijadikan standar utama dan pijakan prinsip dalam pengaturan dan pengendalian kehidupan rakyat dalam hubungannya dengan pemimpin dan pemerintahan, dengan tetap mengacu pada lima tujuan syariat Islam.⁷⁰

b. Konsep Kekuasaan Siyasah Dusturiyah

Salah satu aspek dari isi konstitusi atau undang-undang dasar adalah bidang-bidang kekuasaan negara. Kekuasaan itu dikenal

⁷⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah (Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam sejak Muhammad SAW. Hingga Al-khulafaur Ar- Rasyidin*, (Bandung: CV PUSTAKA SEJA, 2015), hlm. 40

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan istilah *Majlis Syura* atau *ahl-halli wa al-aqdi* atau seperti yang disebut Abu A'la Al-Maududi sebagai Dewan Penasihat serta Al-Mawardi menyebutnya dengan *Al-Ikhtiyar*.

Kekuasaan negara dibagi dalam tiga bidang yaitu:

- 1) Lembaga *legislatif*. Lembaga ini adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan untuk membuat undang-undang.
- 2) Lembaga *eksekutif*. Lembaga ini adalah lembaga negara yang berfungsi menjalankan undang-undang.
- 3) Lembaga *yudikatif*. Lembaga ini adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman.

Setiap negara terdiri dari lima unsur penting, yaitu :

- 1) Kekuasaan yang menjalankan negara, mengurus organisasi, dan menangani urusan-urusan rakyatnya. Kekuasaan ini terdiri atas seorang kepala negara, para cabinet, dan pejabat di beberapa daerah serta jabatan yang terdiri atas militer dan sipil.
- 2) Rakyat yang memegang kedaulatan suatu negara atau yang memilih para pemimpin dan wakil rakyat atau yang lebih sering menjadi korban kezaliman para penguasa yang korup.
- 3) Wilayah suatu negara dengan perbatasan yang jelas.
- 4) Undang-undang yang berlaku dalam suatu pemerintahan dan negara.
- 5) Tujuan utama pemerintahan dan negara yang didukung oleh segenap rakyatnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintah adalah penyelenggara negara dan yang mengurus administrasi negara, mengatur urusan negara, memutuskan permasalahan negara dalam berbagai kebijakan politis suatu negara dan pemerintahan, dan dalam hubungan antar bangsa dan negara, urusan-urusan penghidupan, kemakmuran negara, dan pembelaan negara terhadap kepentingan rakyat serta dalam kaitannya dengan kepentingan ekonomi negara.⁷¹

Jadi dari penjelasan tentang Siyasah dusturiyah di atas, Siyasah Dusturiyah bagian dari siyasah syar'iyah, artinya politik ketatanegaraan yang berpedoman pada ajaran-ajaran Allah dan ajaran Rasulullah SAW, dengan tujuan untuk mencapai kemaslahatan umat. Dalam siyasah dusturiyah, dasar berpolitik berpedoman pada prinsip-prinsip hukum islam, yang dapat berkembang dan mengalami perubahan selama tidak menyimpang dari prinsip-prinsip yang berlaku. Di samping itu, untuk mewujudkan kemaslahatan umat terletak pada pemegang kekuasaan (pemerintah, *ulil amri*). Oleh karena itu, bentuk hukum, peraturan, dan kebijaksanaan politik yang dibuat oleh pemegang kekuasaan bersifat mengikat. Wajib diataati oleh setiap masyarakat selama semua tidak bertentangan dengan syari'at.

⁷¹Op.cit, H. Boedi Abdullah, hlm.21-22

E. Syariat Islam terhadap Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

Lingkungan hidup menurut pandangan Islam bukan saja masalah yang berdimensi muamalah, melainkan juga menjadi masalah yang memiliki dimensi teologis karena sifat dan keterkaitannya dengan tugas-tugas kemakhlukan di muka bumi. Dari sudut pandang ajaran agama Islam telah banyak ajaran tentang lingkungan hidup. Ajaran agama tentang prinsip keseimbangan dan hidup bersih dan indah merupakan doktrin ajaran agama yang sudah sangat dikenal dan dipelajari umat Islam sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang artinya “Sesungguhnya Allah SWT itu indah dan Dia menyukai keindahan”. Demikian juga ketentuan hukum yang mengatur masalah lingkungan hidup.

Islam berpandangan, bahwa tindakan pencemaran lingkungan hidup dapat dikategorikan sebagai mafasid (kerusakan) yang dalam prinsip ajaran agama Islam harus dihindari dan ditanggulangi. Permasalahan mengenai pencemaran lingkungan khususnya pencemaran udara tidaklah sulit untuk mencari jalan pemecahannya sekiranya manusia taat atas petunjuk Allah SWT.

Sebagai makhluk hidup yang memperoleh hak menggunakan alam ini, manusia harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang diatur oleh pemiliknya, manusia tidak berhak memanfaatkan dan menggunakan alam ini secara sebarangan dan bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan Allah SWT.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Upaya pengawasan pengendalian pencemaran udara yang sudah dilakukan oleh Pemerintah daerah yaitu, pemantauan kualitas udara ambient, pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung, namun hasil dari pengawasan tersebut dapat dikatakan tidak maksimal, tidak ada solusi dan penanganan yang jelas terhadap limbah asap PLTU Ombilin tersebut.
2. Faktor penghambat yang dihadapi oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dalam pengendalian pencemaran udara PLTU yaitu yang pertama tidak ada kewenangan pemerintah kota dalam pencabutan izin dan penerapan sanksi terhadap PLTU, yang kedua kurangnya anggota atau personil dari pada bidang lingkungan hidup sehingga sering terjadinya keterlambatan dalam melakukan pengawasan terhadap kondisi dari PLTU Ombilin tersebut. Yang ketiga terbatasnya anggaran yang diberikan pemerintah daerah untuk menunjang pengendalian pencemaran udara. Yang keempat faktor sarana dan prasarana yang kurang memadai. Sedangkan faktor pendukungnya yaitu adanya pengawasan bersama dinas lingkungan hidup pusat dan provinsi dan dari pihak PLTU terbuka kepada pihak Dinas Lingkungan Hidup tidak ada yang ditutupi.

3. Dalam pandangan fiqih siyasah pengendalian pencemaran udara yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Sawahlunto tidak sesuai dengan syariat islam, karena yang dilakukan adalah merusak jiwa dan kemaslahatan umat.

B. Saran

Disarankan kepada pemerintah daerah Kota Sawahlunto sebaiknya dapat menyediakan sarana dan prasarana serta tenaga ahli yang dapat menunjang kegiatan pengendalian pencemaran udara yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto untuk mencegah pencemaran lingkungan khususnya pencemaran udara oleh usaha atau kegiatan yang ada di wilayah Kota Sawahlunto.

Kemudian perlu adanya peraturan perundang-undangan yang jelas untuk mengatur kewenangan pengawasan terhadap lingkungan hidup oleh pemerintah kabupaten/kota sehingga dalam pelaksanaan tugas pengawasan tidak terjadi tumpang tindih akibat kewenangan yang tidak jelas.

Perlunya upaya bersama dalam mengatasi dan mengawasi permasalahan pencemaran udara ini yang tak hanya dilakukan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup saja, bisa dengan cara melibatkan Instansi terkait seperti UPTD Labor Lingkungan Hidup. Kemudian masyarakat juga dapat ikut berpartisipasi dalam melakukan pengawasan secara tidak langsung dengan melaporkan kepada pihak Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup untuk dilakukan pengawasan lebih lanjut kepada PLTU Ombilin.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diharapkan Pemerintah Kota Sawahlunto juga harus lebih mendengarkan keluhan kesah dari pada masyarakat sekitar agar dapat melakukan pengawasan lebih optimal lagi yang melahirkan solusi atau caraterbaik dalam mengatasinya. Kemudian jika memang untuk memberikan tindakan tegas adalah kewenangan dari provinsi, maka harusnya Pemerintah Kota Sawahlnto dengan instansi terkait memberikan laporan yang jelas dan sesuai fakta kepada pihak provinsi sehingga dapat dilakukan tindakan tegas.





DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abdullah, Boedi, 2012. *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, (Bandung : CV Pustaka Setia)
- Adi, Rianto, 2004. *Metodologi Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit), cet. ke-1
- Amkunto, Suharsimi, 2013. *Prosedur Penelitian (suatu pendekatan praktik)*, (Jakarta : Rineka Cipta), cet. Ke-5
- Baskoro, Wahyu, 2005. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Setia Kawan)
- Bungin, Burhan, 2003. *Analisis data penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), cet. Ke-1
- Djarmiko, Margono, Wahyono, 2000. *Pendayaan Waste Management (Kajian Lingkungan Indonesia)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Djazuli H.A, 2003. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana)
- HJ. Mukono, 2006. *Prinsip Dasar Kesehatan Lingkungan*, (Surabaya: Airlangga University Press)
- Ibrahim, Duski, 2019. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-kaidah fiqh)*, (Palembang: CV. Amanah), cet. ke-1
- Iqbal, Muhammad, 2014. *Fiqh siyasah: kontekstualisasi doktrin politik islam* (Jakarta: Pramedia Group)
- Kementrian Agama RI, 2006. *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro)
- Kristianto, Philip, 2002. *Ekologi Industri*, (Yogyakarta: ANDI)
- Kutat Prabowo, dkk, 2018. *Penyehatan Udara*, Cet. 1, (Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan)
- Lexy, J. Moelong, 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya), cet. ke-11
- Machdar, Izarul, 2018. *Pengantar Pengendalian Pencemaran: Pencemaran Air, Pencemaran Udara dan kebisingan*, Yogyakarta: Deepublish

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- © Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Moh Idrus, 2009. *Metode Penelitian Ilmu Social*, (Jakarta: Erlangga), ed Ke-2
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Norm dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), cet.ke-1
- Makono, 2011. *Aspek Kesehatan Pencemaran Udara*, Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair (AUP)
- N.H.T.Siahaan, 2004. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, (Jakarta: Erlangga)
- Purungan, Suyuthi, 2002. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Ed. 1, Cet. 5)
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta: Pusat Bahasa)
- Redi, Ahmad, 2018. *Hukum Sumber Daya Alam Indonesia*, Setara Press, Malang
- Ruslan, Rosady, 2006. *Metode Penelitian Publik Relation Dan Komunikasi*, (Jakarta: Rajawali Pers)
- Saebani, Ahmad, 2015. *Fiqh Siyasah (Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam sejak Muhammad SAW. Hingga Al-khulafaur Ar-Rasyidin)*, (Bandung: CV PUSTAKA SETIA)
- Sandu Siyoto, dkk, 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*, Cet.1, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing)
- Supasmi, Emilda, 2020, *Manajemen dan Kepemimpinan*, (Depok: Rajawali Pers)
- Sumantri, Arif, 2013. *Kesehatan Lingkungan*, Cet.2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group)
- Sunu, Pramudya, 2001. *Melindungi Lingkungan dengan Menerapkan ISO 14001*, (Jakarta :PT.Grasindo)
- Syarifuddin, Amir, 2009. *Ushul Fiqh jilid 2*, (Jakarta: Kencana)
- Wendy Sepmady Hutahaean, 2018, *Dasar Manajemen*, (Malang: Ahli media Press)
- Wibawa, Tresna, 2009. *Pencemaran Lingkungan*, (Jakarta: Rinka Cipta)
- Widnu Wardhana, Arya, 2004. *Dampak Pencemaran Lingkungan*, Cet.3, (Yogyakarta: ANDI)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Undang-Undang/ Peraturan

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara

Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
UU PPLH Pasal 20 Angka 2

Jurnal

Anton Afrizal Candra, *Pemikiran Siyashah Syar'iyah Ibnu Taimiyah*, Jurnal UIR Law Review, Vol. 01, No. 02, Oktober 2017

Fatta Nur Ardiansyah, Skripsi: *"Upaya Pencegahan Kerusakan Muatan Dingin dan Beku di MV Meratus Medan I"*, (Semarang, PIP, 2017)

Luthfi Fahrul Rizal, *Prinsip Siyashah Syar'iyah tentang Darurat Negara*, Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, Vol. 14, No. 1, Juni 2020

Nursyafni Atikah, Skripsi: *"Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar Dalam Pengendalian Pencemaran Sungai Akibat Limbah Industri Di Kecamatan Tapung"* (Pekanbaru: UIN SUSKA RIAU, 2019)

Website/Situs

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kota_Sawahlunto diakses pada Tanggal 10 Februari 2021 Pukul 16.00 Wib

<https://langgam.id/kecamatan-talawi-kota-sawahlunto/> diakses pada Tanggal 10 Februari 2021 Pukul 15.35 Wib

<https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/ptlx3f348/lbh-padang-minta-pltu-ombilin-berhenti-operasi> diakses pada 21 Maret 2020

Wawancara

Sumber dari Puskesmas Talawi.

Sumber: Kantor Camat Talawi Kota Sawahlunto, 2021

Sumber: Kantor Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto, Kepala Sub Bagian Umum, 2021

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara dengan Bapak Adriyan, di Kantor Lingkungan Hidup, tanggal 16 Agustus 2021

Wawancara dengan Bapak Adri Maha Putra, di kantor Lingkungan Hidup, tanggal 16 Agustus 2021

Wawancara dengan Bapak Ahmadi, Kantor PLTU Sijantang, 11 Januari 2021

Wawancara dengan Bapak Delfi Makmur, Kantor Desa Sijantang Koto, Kota Sawahlunto, 13 Januari 2021

Wawancara dengan Bapak Elman, di Desa Sijantang, tanggal 9 Juni 2021

Wawancara dengan Bapak Hadi Mulyanto, di PLTU Sijantang, tanggal 16 Agustus 2021

Wawancara dengan Bapak Heantomas, Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto, tanggal 4 Januari 2021

Wawancara dengan ibuk Ida, di Desa Sijantang, tanggal 16 Agustus 2021

Wawancara dengan Bapak Tristi Antoni, di Kantor Lingkungan Hidup, tanggal 16 Agustus 2021

Wawancara dengan Bapak Zulkarnain, di Desa Sijantang, tanggal 9 Juni 2021

Wawancara dengan ibu Yen, di Desa Sijantang, tanggal 10 Juni 2021

Wawancara dengan Riski, di Desa Sijantang, tanggal 10 Juni 2021

LAMPIRAN

1. Wawancara dengan masyarakat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Wawancara dengan Bapak Ahmadi selaku Manajer Bagian Keuangan dan Umum dengan Bapak Hadi Mulyanto dan Bapak Deki Bagian Lingkungan PLTU



3. Wawancara dengan Bapak Heantomas selaku Kepala Bidang Lingkungan Hidup



© Hak

4. Wawancara dengan Bapak Adri Maha Putra Bagian Kepala Seksi Tata Lingkungan



5. Wawancara dengan Bapak Tristi Antoni Bagian UPTD Laboratorium Lingkungan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak

6. Wawancara dengan Bapak Adriyan Kepala Seksi Pengawasan dan Pemulihan Lingkungan Hidup



7. Wawancara dengan Bapak Delfi Makmur selaku Kepala Desa Sijantang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Upaya Pemerintah Daerah dalam Pengendalian Pencemaran Udara PLTU di Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto”**, yang ditulis oleh :

Nama : Yulia Azizah Syarif
NIM : 11724203055
Program Studi : Hukum Tata Negara(Siyasah)

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 06 Agustus 2021 M

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr.H. Mawardi, M.Ag

Sekretaris
Irfan Zulfikar, M.Ag

Penguji I
Dr. Hj. Hertina, M.Pd

Penguji II
Haswir, M.Ag

Kepala Sub Bagian Akademik
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag

NIP. 19750801 200701 1 023

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : YULIA AZIZAH SYARIF

NPM : 11724203055

Program Studi: HUKUM TATA NAGARA (SIYASAH)

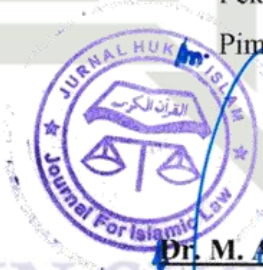
Judul : *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Upaya Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Pencemaran Udara Pltu Di Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto*

Pembimbing : Dr.Sofia Hardani,M.Ag

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 18 Agustus 2021

Pimpinan Redaksi



Dr. M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL

NIP. 198804302019031010

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة والقانون
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 02 Desember 2020

: L. 04/F.I/PP.00.9/6892/2020

: Basa

: 1 (Satu) Proposal

: **Mohon Izin Riset**

Kepada

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: YULIA AZIZAH SYARIF
NIM	: 11724203055
Jurusan	: Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester	: VII (Tujuh)
Lokasi	: Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : **TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGENDALIAN PENCEMARAN PLTU BERDASARKAN PERDA NO. 2 TAHUN 2013 DI KOTA SAWAHLUNTO (Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Sawahlunto)**

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
 NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jln.Setia Budi No.15 Padang Telp. 0751-811341, 811343 Fax. 0751-811342
<http://dpmpptsp.sumbarprov.go.id>

SURAT KETERANGAN

Nomor : 570 / 2263 - PERIZ/DPM&PTSP/XII/2020

Rekomendasi Penelitian

Melimbang : a. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan perlu diterbitkan rekomendasi penelitian;
 b. Bahwa sesuai konsideran huruf a diatas, serta hasil Verifikasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, berkas Persyaratan Administrasi Penelitian telah memenuhi syarat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian yang telah Dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Memperhatikan : Sesuai Surat Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Suska Riaunomor : Un.04/F.I/Pp.00.9/6892/2020 Tanggal 02 Desember 2020 Tentang Mohon Surat Pengantar Izin Penelitian.

Dengan Ini Menerangkan Bahwa Kami Memberikan Rekomendasi Penelitian Kepada :

Nama : Yulia Azizah Syarif
 Tempat/Tanggal Lahir : Sawalunto
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Alamat : Sawalunto
 Nomor Kartu Identitas : 1373016107980002
 Judul Penelitian : Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Upaya Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Pencemaran Udara Pitu Berdasarkan Perda No. 2 Tahun 2013 Di Kota Sawalunto (Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan Dan Pertamanan Kota Sawalunto)
 Lokasi Penelitian : Sawalunto
 Jadwal Penelitian : Desember 2020 s.d Mei 2021
 Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat / Lokasi Penelitian;
2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu Kestabilan Keamanan dan Ketertiban di daerah setempat;
3. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat;
4. Bila terjadi penyimpangan dari maksud / tujuan penelitian ini, maka surat rekomendasi ini tidak berlaku dengan sendirinya.

Demikianlah Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 07 DESEMBER 2020

A.n. GUBERNUR SUMATERA BARAT
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI SUMATERA BARAT

MASWAR DEDI, A.P.M.Si
 NIP. 197406181993111001



Tembusan:

1. Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan)
2. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.





PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/36967
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04.F.I/PP.00.9/6892/2020 Tanggal 2 Desember 2020**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

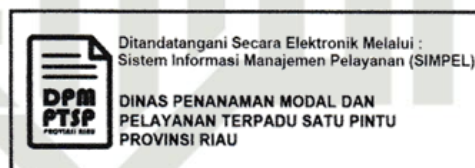
- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : YULIA AZIZAH SYARIF |
| 2. NIM / KTP | : 11724203055 |
| 3. Program Studi | : HUKUM TATA NEGARA |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA PLTU BERDASARKAN PERDA NO.2 TAHUN 2013 DI KOTA SAWAHLUNTO (STUDI PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA SAWAHLUNTO) |
| 7. Lokasi Penelitian | : KOTA SAWAHLUNTO PROVINSI SUMATERA BARAT |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 4 Desember 2020



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Sumatra Barat
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP PENULIS

YULIA AZIZAH SYARIF Lahir di Sawahlunto pada tanggal 21 Juli 1998. Anak Tunggal dari pasangan Ayahanda Simainski dan Ibunda Desmiwati. Riwayat pendidikan yang ditempuh penulis adalah SDN 03 Aur Tajungkang lulus pada tahun 2010. Setelah menyelesaikan pendidikan SD, penulis melanjutkan pendidikan di SMP N 1 Sawahlunto lulus pada tahun 2013. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Sawahlunto lulus pada tahun 2016. Setelah dinyatakan lulus dari SMA, penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2017 di Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah). Berkat do'a dan Motivasi dari keluarga serta teman-teman seperjuangan yang selalu membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini sehingga penulis berhasil dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA PLTU DI KECAMATAN TALAWI KOTA SWAHLUNTO”**. Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kemudahan serta kelancaran dalam menyelesaikan skripsi penulis, hingga akhirnya pada tanggal 06 Agustus 2021 penulis melaksanakan ujian Munaqasyah di Fakultas Syari'ah dan Hukum dan dinyatakan “LULUS” dengan IPK terakhir 3.53 (Sangat Memuaskan) serta berkah mendapatkan gelar Serjana Hukuim (SH).